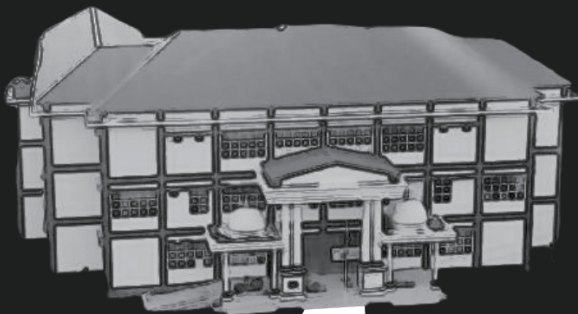


MODERASI BERAGAMA DARI PINGGIR

Kumpulan Esai Wacana Moderasi Beragama di Aceh

Tim Penulis:

M. Ikhwan, Muhajir Al-Fairusy, Jovial Pally Taran, Heri Rahmatsyah Putra,
Anton Jamal, Ramli, Syukri, Rahmalia Usman, Rusmadi,
Assauti, Miftah Ulya, Khalil Mubarrak, Nellis, Sofianis, Nelva Sofia,
Arisma Dewi, Nurul Zahara, Rusnan Dinata, Rasyada, Satri, Irna



Editor:
Dr. Inayatillah, M.Ag



Moderasi Beragama dari Pinggir

Kumpulan Esai Wacana Moderasi Beragama di Aceh

Copyright ©2021 Seuramoe Moderasi Beragama
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin dari penulis/Seuramoe Moderasi Beragama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

Penulis : M. Ikhwan, Muhajir Al-Fairusy, Jovial Pally Taran, Heri Rahmatsyah Putra, Anton Jamal, Ramli, Syukri, Rahmalia Usman, Rusmadi, Assauti, Miftah Ulya, Khalil Mubarrak, Nellis, Sofianis, Nelva Sofia, Arisma Dewi, Nurul Zahara, Rusnan Dinata, Rasyada, Satri, Irna.

Editor : Dr. Inayatillah, M.Ag

Proofreader : Dr. Muhajir Al-Fairusy, M.A

Ide & Desain Sampul : Junaidi, M.Kom.I

Tata Letak : Nurul Fahmi, S.Sos

Cetakan Pertama Desember 2021
Ukuran: 14 X 20 cm
Halaman: xiv + 132
ISBN : 978-623-329-677-9



Diterbitkan oleh:
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Jl. Lingkar Kampus, Gampong Gunong Kleng, Alue Peunyareng,
Kec. Meureubo, Aceh Barat
Telp: (0655) 7551591
Website: www.staindirundeng.ac.id

Bekerjasama dengan:



Literasi Nusantara
Jl. Puncak Joyo Agung No.129, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang, Jawa Timur (65144)
Hp: 0858-8725-4603
Website: www.penerbitlitnus.co.id

MODERASI BERAGAMA DARI PINGGIR

Kumpulan Esai Wacana Moderasi Beragama di Aceh

SAMBUTAN

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

“...The divides are not Islam and western society, the divide is between people who have different values. We must promote connections between people who want to contribute to human values. People who share that commitment can collaborate across cultural divides.” (Abdullahi Ahmed an-Na'im)

Perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia, tak dapat ditolak dan dilawan, karena demikian sunnatullah bekerja. Bahkan, dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13 Allah telah memberi sinyal mengenai perbedaan dan manusia disebut sebagai subjek penting di dalamnya, Allah SWT berpesan jika yang paling bertaqwalah yang paling baik diantara manusia yang datang dari suku bangsa dan segenap perbedaan identitas apapun yang melekat pada mereka. Dengan kata lain, perbedaan-perbedaan itu adalah keniscayaan dan tidak bisa dijadikan sebagai akar persoalan.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih adanya benturan-benturan yang terjadi akibat kegagalan memaknai perbedaan dan tak jarang berujung pada konflik bahkan tindakan anarkis yang seharusnya dihindari dan tidak boleh terjadi. Karena, jika dirujuk pada ajaran semua agama, nilai-nilai utamanya adalah menuntun manusia untuk selalu menjaga perdamaian dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Apalagi Islam, yang berakar dari kata (aslama-yuslimu-islaman) yang bermakna damai, maka sikap menghargai perbedaan perlu secara aktif terus dipupuk dan dikembangkan dalam wilayah yang lebih luas.

Perguruan Tinggi Islam yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah sepatutnya menjadi institusi strategis dalam rangka menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyikapi keberagaman, aktor di dalam yang dapat terlibat secara langsung seperti dosen maupun civitas akademika di lingkungan kampus, semuanya dapat menjadi agen perdamaian dan konsisten megajarkan makna perbedaan antar-manusia yang bermuara pada

sikap saling menghargai dalam bingkai plural dan multikultural terutama dalam konteks bernegara bangsa (nation-state) seperti Indonesia.

Buku yang berjudul “Moderasi Beragama dari Pinggir” yang ditulis oleh M. Ikhwan dan kawan-kawan ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran demi tegaknya perdamaian di tengah pluralitas masyarakat khususnya dalam hal beragama, sekaligus sebagai upaya serius mendukung moderasi beragama yang digaungkan di Indonesia saat ini. Kita telah maklumi bersama bahwa moderasi beragama menjadi salah satu program pemerintah Indonesia yang dipercayakan kepada Kementerian Agama RI sebagai motor penggeraknya.

Oleh karena itu saya sebagai ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, atas nama lembaga satuan kerja kementerian agama sangat mendukung jalannya program ini. Pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pun telah didirikan Seuramoe Moderasi Beragama sebagai wadah yang secara serius ikut mengkampanyekan dan menjunjung kebhinekaan itu.

Sebagai pribadi yang diamanahkan menjadi ketua civitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh saat ini, saya menyambut baik lahirnya buku ini, dan mengapresiasi sebagai ruh kampus yang harus selalau dihadirkan untuk bermanfaat bagi publik luas. Apalagi, konten buku ini berbicara tentang moderasi beragama, yaitu bagaimana seharusnya multikultural dan perbedaan itu dimaknai dalam konteks bermasyarakat.

Akhirnya, saya berharap kerja memproduksi pengetahuan akan terus berlanjut untuk membesarkan nama satuan kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ke depan. Tradisi akademis harus terus digenjut dan didukung semaksimal mungkin, berkomitmen mendorong kemajuan kampus sebagai salah satu PTKIN di Aceh.

Meulaboh, Desember 2021

Dr. Inayatillah, M.Ag

PENGANTAR
Ketua Seuramoe Moderasi Baragama
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam kita bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga buku yang sederhana ini dapat dihadirkan ke hadapan pembaca sekalian. Buku ini dihadirkan sebagai berkomitmen mendukung tumbuh-suburnya moderasi beragama di Indonesia, yang diyakini sebagai salah satu jalan alternatif mengimplementasikan nilai-nilai perdamaian di tengah kompleksitas multikultural yang dianugerahkan Allah kepada bangsa Indonesia.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia khususnya bagi kita yang beragama Islam. Beliau sebagai manusia yang berkomitmen mengimplementasikan perdamaian dengan menghargai perbedaan, bahkan pada orang-orang yang sangat jelas memusuhinya pada saat itu, akan tetapi beliau dapat memakluminya sebagai ketidaktahuan mereka sekaligus tantangan bagi Islam awal yang baru saja disyariatkan Allah, lalu memaafkan dan mendoakan mereka.

Ucapan terimakasih dihaturkan kepada Kementerian Agama RI melalui satuan kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah mendukung penuh dalam penerbitan buku ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh penulis yang sudah menyumbangkan ide dan gagasan mereka melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku ini. Tidak lupa juga diucapkan permohonan maaf jika terdapat kekeliruan dan kiranya dapat diberi masukan-masukan dari pada pembaca sekalian demi perbaikan buku ini pada terbitan berikutnya.

Bicara Moderasi beragama tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia saat ini khususnya di lingkungan

Kementerian Agama. Moderasi beragama semakin booming ketika digaungkan oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia 2014 sampai dengan 2019 yang lalu. Pun demikian, sebelum itu nilai-nilai yang sama dengan moderasi beragama telah digagas oleh para pemikir Islam lainnya. Misalnya, dalam Islam dikenal adanya konsep Islam washatiyyah (wasathiyyatu al-Islam), Islam tegahan atau Islam moderat. Buku-buku yang membahas tentang hal itu juga telah banyak disajikan oleh berbagai kalangan, terlebih pada saat ini program moderasi beragama dimasukkan sebagai salah satu prioritas Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dihadirkan salah satu buku yang terkait dengan moderasi beragama, secara umum tulisan-tulisan dalam buku ini lahir dari “tangan dingin” para penulisnya yang mempunyai ragam latar belakang seperti akademisi, jurnalis dan masyarakat umum berupa opini atau esai. Buku ini diberi judul “Moderasi Beragama dari Pinggir”. Judul yang sangat menarik perhatian, karena pinggir yang dimaksud dalam hal ini bermakna dua hal.

Pertama menunjukkan bahwa para penulis berdomisili di pinggir Indonesia secara geografis (Aceh), sehingga dapat dipahami meskipun Aceh jauh dari pusat Indonesia tapi tidak ingin terlambat dalam merespon isu nasional seperti yang tengah digagas moderasi beragama yang bertujuan merawat persatuan dan perdamaian bangsa Indonesia tercinta ini.

Kedua menunjuk pada tujuan moderasi beragama itu sendiri. Kita pahami bahwa moderasi beragama sebagai sikap adil, seimbang, dan tengah-tengah. Sehingga, menuju tengahan (wasathiyyah) harus dilakukan dorongan dari pinggir sikap ekstrem (liberal-radikal) agar dapat bergerak ke tengah menjadi sikap moderat. Pada saat yang bersamaan, konsep moderasi beragama yang sudah disusun oleh kementerian agama Republik Indonesia tentu diperhatikan dan dijadikan sebagai acuan.

Adapun buku ini dihadirkan untuk memperkaya khazanah bacaan terkait dengan moderasi beragama tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai moderasi beragama ada yang tidak terjamah oleh “kacamata” orang banyak karena letaknya ada

di daerah yang jauh seperti Aceh sebagai wilayah pinggir barat Indonesia. Sehingga, perlu kiranya digali nilai-nilai moderasi beragama tersebut untuk dijadikan sebagai pegalaman berharga.

Untuk mengurai hal tersebut Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh menginisiasi untuk mengumpulkan naskah dari para penulis. Semoga dengan diterbitkannya buku moderasi beragama dari pinggir ini dapat dapat memberi manfaat bagi semua kalangan. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melalui unit Seuramoe Moderasi Beragama yang sudah dibentuk berkomitmen ikut mengawal perogram pemerintah khususnya dalam bidang kerukunan, perdamaian dan moderasi beragama ini. Terimakasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Meulaboh, Desember 2021

M. Ikhwan

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
1. Mengenal Moderasi Beragama.....	1
<i>Oleh: M. Ikhwan</i>	
2. Moderasi Beragama dari Pinggir dan Perbatasan Aceh..	7
<i>Oleh: Muhajir Al-Fairusy</i>	
3. Moderasi Beragama; Reflektif dan Argumentatif.....	11
<i>Oleh: Jovial Pally Taran</i>	
4. Moderasi Beragama Sebuah Pesan Komunikasi Pembangunan.....	19
<i>Oleh: Heri Rahmatsyah Putra</i>	
5. Moderasi Beragama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.....	29
<i>Oleh: Anton Jamal</i>	
6. Pluralisme Agama Kaum Sufi.....	37
<i>Oleh: Ramli</i>	
7. Moderasi Beragama dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat.....	47
<i>Oleh: Syukri</i>	
8. Moderasi Beragama di Era New Media.....	55
<i>Oleh: Rahmalia Usman</i>	
9. Tokoh Lintas Agama Terdepan Menjaga Keharmonisan	63
<i>Oleh: Rusmadi</i>	
10. Wasathiyah atau Moderasi Beragama Ada di Tengah Kita.....	71
<i>Oleh: Assauti</i>	
11. Literasi Santri dalam Memahami Moderasi.....	79
<i>Oleh: Miftah Ulya</i>	

12. Moderasi Beragama Anti Thesis Liberalisme-Radikalisme.....	89
<i>Oleh: Khalil Mubarrak</i>	
13. Antara Papua dan Aceh dalam bingkai Moderasi Beragama.....	95
<i>Oleh: Nellis</i>	
14. Toleransi dalam Bingkai Multikultural.....	99
<i>Oleh: Sofianis</i>	
15. Kehidupan Etnis China di Abdy.....	103
<i>Oleh: Nelva Sofia</i>	
16. Membangun Dialog Umat Beragama.....	107
<i>Oleh: Arisma Dewi</i>	
17. Tolak Bala antara Agama dan Budaya.....	111
<i>Oleh: Nurul Zahara</i>	
18. Toleransi Pemburu Babi di Negeri Tauhid dan Sufi....	115
<i>Oleh: Rusnan Dinata</i>	
19. Tari Saman Simbol Perekat Keberagama di Aceh Barat ..	119
<i>Oleh: Rasyada</i>	
20. Memahami Toleransi Beragama dari Relasi Sosial.....	123
<i>Oleh: Satri</i>	
21. Indonesia dan Moderasi Beragama.....	127
<i>Oleh: Irma</i>	
TENTANG EDITOR.....	131

Mengenal Moderasi Beragama

Oleh: M. Ikhwan

Dosen dan Ketua Seuramoe Moderasi Beragama STAIN Meulaboh

Email: m.ikhwan@staindirundeng.ac.id

Pepatah “*Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta*”, sering diucapkan oleh penceramah agama dan pejabat sebagai isyarat akan memperkenalkan dirinya, terlebih untuk audiens atau masyarakat yang baru ditemuinya.

Pepatah ini tidak diketahui kapan dan oleh siapa mulai digunakan, yang jelas sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Perkenalan dalam setiap pertemuan perdana dapat dianggap sebagai awal saling mengenali seperti dosen dan mahasiswanya, guru dan muridnya, bahkan Tuhan dan hambanya.

Begitu pula halnya dengan moderasi beragama yang cenderung baru dan sedang menjadi program prioritas pemerintah saat ini, perlu dilakukan pengenalan dan sosialisasi pada publik agar tidak dimaknai secara liar dan dis-orientasi.

Secara umum, moderasi beragama dimaknai sebagai ekspresi sikap keagamaan baik secara individu atau kelompok dengan mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak.

Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda.

Dengan kata lain, moderasi beragama itu seimbang dalam memahami ajaran agama yang diekspresikan secara konsisten sekaligus tetap berpegang teguh pada prinsip ajaran agama masing-masing, namun dalam waktu yang bersamaan mampu mengakui keberadaan agama dan kepercayaan lain.

Perilaku moderasi beragama lebih kongkrit diwujudkan

dalam sikap toleran, saling menghormati perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara-cara kekerasan.

Pemerintah menaruh keseriusan dalam penguatan moderasi di Indonesia, hal ini tampak dari Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menempatkan moderasi beragama sebagai program prioritas yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, bahkan Kementerian Agama telah dipercayakan sebagai leading sector-nya.

Pada tatanatan implementasinyaapun telah dimulai dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang dinilai paling bertanggung jawab dalam mempertahankan moderasi beragama tersebut.

Alasan ini dipilih karena PTKI berada di bawah payung Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang konsern dan bertanggung jawab dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Selain itu PTKI dinilai intens melakukan kajian-kajian keislaman (*Islamic studies*), sebagai agama yang dianut oleh mayoritas umat beragama di Indonesia.

Dapat diterima atau tidak beberapa kasus ekstremisme atau radikalisme di Indonesia identik dengan penganut aliran atau kelompok ajaran agama tertentu di Indonesia termasuk yang berafiliasi pada Islam.

Sebagai upaya membendung arus ekstremisme atau radikalisme itu, telah dan akan didirikan rumah moderasi beragama pada seluruh PTKI se-Indonesia, dengan demikian moderasi beragama diharapkan benar-benar menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak serta dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan program.

Jalan Tengah Moderasi Beragama

Moderasi beragama baru digaungkan dalam setengah

dekade terakhir tepatnya mulai dari menteri Agama RI Lukman Hakim Siafuddin menjabat hingga saat ini. Pun demikian, dalam praktiknya telah dilakukan jauh sebelum itu bahkan sejak Islam awal.

Dalam sebuah potongan hadist yang panjang Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya “...*demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat malam dan juga tidur dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku*” (HR. Al-Bukhari No. 5063).

Sebenarnya apa yang sedang dicontohkan oleh Nabi saat itu adalah praktik moderasi beragama, meskipun ia tidak menyebut kata persis seperti itu. Karena yang ia lakukan itu adalah fitrah kemanusiaan dalam menjaga keseimbangan hidupnya, sehingga moderasi beragama itu dapat dipahami sebagai kebutuhan manusia (fitrah) yang menitik beratkan perhatian pada sikap yang tidak berlebihan sekalipun itu dalam hal ibadah. Dalam konteks ke-Indonesiaan telah diajukan empat indikator minimum sebagai acuan moderasi beragama tersebut.

Pertama komitmen kebangsaan, hal ini merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmen menerima Pancasila sebagai dasar bernegara.

Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur.

Kedua toleransi, toleransi merupakan sikap terbuka (inklusif) untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk

beragama atau berkeyakinan dan mengekspresikannya, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang diyakini. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi juga mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Ketiga anti radikalisme dan kekerasan, radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Keempat akomodatif terhadap budaya lokal, perjumpaan antara agama dan budaya kerap mengundang perdebatan yang panjang dan menyisakan beberapa persoalan.

Misalnya, Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu dan setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia.

Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Pada sisi ini rentan terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Untuk lebih kongkrit indikator yang disebutkan di atas dapat terwujud dalam kerangka kerja dengan memperhatikan perinsip-prinsip moderasi beragama berikut ini.

Pertama *tawassuth* (jalan tengah) yang dimaknai sebagai pemahaman dan pengamalan agama yang tidak berlebih-lebihan

(*ifrāth*) dan juga tidak menguranginya (*tafrīth*). Tawassuth juga dapat dipahami sebagai sikap tengahan diantara fundamentalis dan liberalis.

Kedua *tawāzun* (berkeseimbangan) yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang dalam semua aspek kehidupan orientasi duniawi dan ukhrowi, sikap *tawāzun* tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat memilah antara perbedaan (*ikhhtilāf*) dan penyimpangan (*inhirāf*).

Ketiga *i'tidāl* (lurus dan tegas), maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.

Keempat *tasāmuh* (toleransi) yang diartikan berupa sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam sekalipun tidak sependapat dengannya.

Kelima *musāwah* (egaliter), persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah.

Keenam *syurā* (musyawarah) sebagai prinsip saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara.

Perinsip moderasi beragama ini merupakan kerangka acuan yang dapat selalu digunakan karena ia berlaku universal yang melampaui batas daerah, wilayah, negara serta dan batasan lainnya, dengan kata lain bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterima semua kalangan. Wallahu a'lam. (*)

*Artikel ini pernah diterbitkan di kolom *serambinews.com*
<https://aceh.tribunnews.com/2021/11/30/mengenal-moderasi-beragama>.

Menyukat Moderasi Beragama dari Pinggir Indonesia

Oleh: Muhajir Al-Fairusy

Peneliti Perbatasan Aceh dan Dosen Antrhopologi STAIN Meulaboh

Email: muhajiralfairusy@gmail.com

Segala wacana yang diproduksi di pusat kekuasaan Indonesia (baca; Jakarta) kerap menjadi perbincangan ketat di seluruh Indonesia. Pun, tak sepenuhnya langsung dapat diterima oleh kumpulan manusia dari pinggir, mereka yang bermukim dan menetap di provinsi-provinsi luar Pulau Jawa, terutama provinsi pinggiran seperti Aceh dan Papua.

Frasa pinggir dimaksudkan mereka yang hidup di luar arena tengah. Bagaimanapun, provinsi di luar Pulau Jawa sebagai basis sentral kekuasaan Indonesia dengan segudang wacana kebangsaannya memang harus dibujuk dan dirayu untuk dapat menerima program pusatisasi tersebut dari dulu. Mulai dari orde baru yang cenderung memaksakan penerimaan ruang kebudayaan identitas dari pusat, hingga wacana moderasi beragama yang masih menjadi perdebatan hingga sekarang.

Pertanyaan paling mendasar, bagaimana kita menyukat produksi wacana moderasi beragama dari pusat itu, saat bersamaan harus berhadapan dengan tradisi dan identitas lokal. Agen-agen Kementerian Agama, mulai dari kuaket, madrasah hingga PTKIN dan S dituntut untuk menjadi juru kampanye moderasi beragama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna moderasi yang digaungkan oleh Kementerian Agama sebagai panglima kerjanya.

Rentetan buku pedoman mederasi telah diedarkan, dan program kerja yang mengarah pada upaya moderisasi beragama

juga telah dilakukan. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana, isme moderasi beragama dapat dipahami, diterima dan didistribusikan dalam sikap dan perilaku beragama masyarakat Indonesia, terutama mereka yang dari pinggir. Kekalutan sikap dalam beragama sebenarnya paling bergentayangan justru di pusat, mulai dari benturan, gesekan hingga konflik muncul di pusat setelah orde baru.

Memang, konflik atas nama etnis dan agama pasca orde baru sempat mendapat rating tinggi di beberapa wilayah Indonesia, seiring tenggelamnya daya otoriter dan mencuatnya otoritarinisme ke arah reformasi. Gerakan ekstrimis yang dulu ditiarapkan perlahan membunyah, dan masuk lebih jauh dalam pusara perpolitikan Indonesia.

Di Pinggir Indonesia, dari dulu manusia hidup dengan corak dan entitas masing-masing dalam beragama. Di Aceh misalnya, manusia mampu hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda agama. Bahkan, di jantung pusat kota yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah sebagai simbol kekuatan Islam yang dijadikan identitas, rumah ibadah agama lain (Gereja dan Pura) masih dapat ditemui. Relasi ekonomi berjalan tanpa kesan ekstrimis. Pun demikian, Aceh hanya mengalami gesekan dengan paham isme internal umat Islam, yang saling berebut pengaruh.

Lalu, apa makna moderasi beragama, bagaimana masyarakat harus menyukat wacana ini dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Jika dirujuk dari beberapa bacaan yang pernah dilontarkan oleh Azyumardi Azra dan Oman Fathurrahman, keduanya merupakan guru besar UIN Jakarta yang amat konsen menyuarakan moderasi beragama, wacana dan paradigm ini berangkat dari kegelisahan atas cara beragamaan masyarakat Indonesia yang kerap mendompleng agama untuk urusan politik dan kuasa lainnya.

Beberapa peristiwa menunjukkan, jika agama kerap

dijadikan sebagai symbol dalam rangka mendongkrak elektabilitas politik, mulai dari pemilihan OSIS hingga kepala daerah. Moderasi beragama berasal dari kata sifat-moderat. Turunan dari kata *moderation*, yang memiliki makna tidak berlebih-lebihan. Kata ini sendiri berasal dari kata latin moderetil yang bermakna seimbang. Moderasi dalam konteks KBBI dipahami sebagai upaya mengurangi kekerasan. Maka, moderasi beragama adalah upaya dan sikap serta cara pandang mengurasi kekerasan dalam beragama dengan cara ekstrim.

Islam yang berasal dari Bahasa Arab juga menawarkan makna dari moderasi beragama, yang bersumber dari kata *wasath*, artinya sama, yaitu di tengah-tengah. Lebih spesifik adil dan berimbang. Mereka yang kemudian mampu berlaku adil dalam Bahasa Arab disebut *wasith*. Kondisi ini dapat dilihat dari keberadaan wasit dalam arena olahraga, kerja utama mereka adalah berlaku adil, tidak memihak, dan memastikan pertandingan berjalan dengan sportif.

Keberadaan moderasi berseberangan dengan ekstrim, sikap yang melampaui batas. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dan menjunjung perbedaan berlandaskan prinsip adil dan kemanusiaan. Moderasi beragama bertujuan sebagai upaya menjaga keutuhan Indonesia.

Artinya, memilih sikap moderat merupakan langkah dalam rangka menjaga keseimbangan kebebasan beragama dengan sikap menjaga keutuhan kebangsaan. Apalagi, jika dibongkar, semua agama diturunkan untuk memuliakan manusia, jadi mereka yang tidak menghormati sisi kemanusiaan dapat disebut ekstrim, dan bentuk pelanggaran atas nama agama.

Memang, amat mustahil menyatukan cara pandang beragama manusia Indonesia yang memiliki identitas kemajemukan. Apalagi, klaim atas kebenaran tafsir agama tertentu sangat

potensial untuk mewujudkan gesekan dan konflik. Beranjak dari itu, wacana moderasi beragama dikumandangkan, di mana semua masyarakat Indonesia harus berada di rel tengah. Tak boleh bersikap berlebihan dengan menonjolkan sikap beragama secara berlebihan dalam konteks politik dan sikap eksklusif.

Jika dirujuk pada serangkaian konsep dan pengertian moderasi beragama yang disampaikan oleh cendekiawan dari Kementerian Agama dan PTKIN, maka moderasi beragama merupakan upaya mencegah munculnya gesekan dan sikap ekstrimis di tengah masyarakat yang mengatasnamakan agama karena sikap eksklusif. Kondisi ini ditengarai dapat berujung pada konflik dan pertikaian yang akan merobek jalinan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam konteks pinggiran, sukatan moderasi beragama dapat dimanfaatkan untuk menyatukan perbedaan pandangan masyarakat yang tidak pada rel tengah. Di Aceh, moderasi beragama dapat diletakkan pada rel di mana kontestasi antara kelompok umat Islam yang kekeh dengan pemahamannya, di saat bersamaan menolak paham lain yang ditengarai dapat mengancam kuasa sebagian kelompok.

Moderasi beragama dari pinggir, khususnya di Aceh, dapat dipahami sebagai upaya menyukat nilai moderasi antar-kelompok yang berbeda paham dalam satu keagamaan, bukan perbedaan agama. Dari sana, kerja-kerja agensi Kementerian Agama harus digenjot, karena pada saat bersamaan, gesekan internal lebih tajam dibanding eksternal antar-umat beragama. (*)

Moderasi Beragama; Reflektif dan Argumentatif

Oleh: Jovial Pally Taran

Dosen STAIN Meulaboh

Email: jovialtaran@staindirundeng.ac.id

Sudah beberapa tahun belakangan ini pemerintah gencar mensosialisasikan program moderasi beragama sebagai jalan memahami agama secara moderat dan menjauhkan sikap intoleran. Berbagai kegiatan baik berupa diskusi webinar dan lain sebagainya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Bahkan, dalam penguatan moderasi beragama ini, berbagai kajian dari lintas agama juga kerap dilakukan. Tujuan utama ialah untuk merumuskan pemahaman moderasi beragama yang dapat dipahami secara baik oleh masyarakat.

Sayangnya, kampanye moderasi beragama masih dipandang negatif oleh sebagian kalangan terutama umat Islam. Sebagian merasa bahwa Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, sering dijadikan objek contoh negatif sebagai agama yang intoleran, kemudian di sisi lain, agama semisal Hindu di Bali sering dijadikan sebagai contoh terbaik dan toleran dalam penerapan pemahaman toleransi beragama. Bukan ingin mempersoalkan toleransi agama selain Islam, tetapi hal ini mensinyalir adanya ketidakobjektifan menilai yang masih menjadi persoalan besar bagi bangsa ini untuk bersikap adil.

Habib Husein Ja'far al-Haydar, dalam satu waktu webinar yang diselenggarakan oleh Labpsa UIN Ar-Raniry (Youtube Labpsa TV, 2020), pernah menjelaskan bahwa pemahaman moderasi beragama masih seringkali salah diartikan. Moderasi beragama dianggap sebagai jalan pembelaan terhadap agama minoritas atas mayoritas. Padahal menurutnya, moderasi beragama merupakan

sebuah pemahaman *Wasathan*, yang artinya berdiri di tengah atau adil. Ibarat wasit, moderasi beragama merupakan sebuah sikap menilai suatu masalah secara adil dan objektif tanpa memandang ini minoritas atau itu mayoritas. Apabila ia salah katakanlah ia salah, juga sebaliknya. Tentu saja dalam konteks moderasi beragama, kita dituntut untuk bersikap bijak, toleran dan saling menasehati dalam kebaikan.

Islam: Historis dan Reflektif

Sejatinya, sebagai agama mayoritas di Indonesia, juga masih banyak hal yang harus dibenahi pada kondisi internal umat Islam. Dan ini menjadi perhatian khusus bagi penulis sendiri sebagaimana yang akan diuraikan dalam tulisan singkat nan sederhana ini. Islam, dalam arti kata sebagai agama yang damai, tentu saja mengajarkan kebaikan dan hikmah di dalamnya. Islam hadir penuh dengan sinergisitas kelembutan dan ketegasan yang ada pada diri Rasulullah Saw. Sebagai nabi dan pemimpin umat, Rasulullah Saw. selalu berdiri di tengah dan bersikap adil dalam menghadapi permasalahan umatnya. Ia, tidak pernah memutuskan suatu perkara langsung kepada aspek hukum dan memberi hukuman. Sebagai seorang nabi, selalu saja ada hikmah dibalik keputusan-keputusan bijak yang diambil olehnya.

Sebagai contoh, pernah suatu ketika seorang perempuan bersuami mendatangi Rasulullah Saw. mengaku telah berzina dengan pria lain dan hamil. Ia memohon ampunan dan hukuman. Apa sikap yang diambil oleh beliau? Rasulullah Saw. memalingkan wajahnya dan menyuruh si perempuan itu untuk pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian ketika si bayi telah lahir, perempuan tersebut kembali mendatangi Rasulullah Saw. Si perempuan kembali meminta hukuman atas dirinya sendiri. Lalu, Rasulullah Saw. kembali menyuruh si perempuan untuk pulang ke rumah agar dapat menyusui si bayi hingga usia 2 tahun. Setelah 2 tahun

berlalu, si perempuan kembali mendatangi Rasulullah Saw. Dan beliau menanyakan kesiapannya untuk menerima hukuman. Dan si perempuan pun menyatakan kesiapannya.

Apa hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut? Dalam menerapkan hukum Islam dibutuhkan pemikiran yang luas dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Hukum literal yang dibuat bukan berarti menjadikannya serta-merta diterapkan tanpa mempertimbangkan *asbab, masalah* dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah Saw. selalu bersikap hati-hati dan bijak dalam mengambil hukum atau keputusan. Hukum Islam dibuat atas kemaslahatan umat. Dalam penerapannya tidak hanya dapat diputuskan secara hitam atau putih atau ini A dan ini B. Perlu adanya sikap hikmah dalam menanggapi berbagai peristiwa sebagaimana kisah tersebut di atas.

Kembali kepada pemahaman moderasi beragama. Indonesia sebagai negara majemuk dengan beragam budaya dan agama sejatinya telah membuktikan diri sebagai negara yang sangat toleran sejak lampau. Kemerdekaan Indonesia dicapai dengan mempertahankan wilayahnya dari barat hingga timur nusantara dengan pengorbanan umat Islam yang menghilangkan 7 kata sakral dalam sila pertama pancasila “...*dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Ini membuktikan sikap bijak dan toleransi umat Islam dengan merangkul umat lainnya dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak hanya itu, sebagai agama mayoritas yang hidup di Indonesia, Islam pun mengakui keberadaan agama-agama lain di Indonesia, setidaknya ada lima agama lain yang diakui oleh negara Indonesia sampai saat ini. Pengakuan ini bukan berarti saling membenarkan ajaran yang terkandung di setiap agama yang ada, melainkan sebagai bentuk keniscayaan keberadaan agama-agama tanpa saling mendiskreditkan dan tetap saling menghormati.

Perlu diperhatikan bahwa, sesama umat beragama dan bernegara dituntut untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan, menerima perbedaan dengan saling menghargai, dengan demikianlah bangsa Indonesia dapat saling merawat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bangsa Indonesia, meski berbeda tetapi tetap satu.

Sebagai semboyan bangsa, *Bhinneka Tunggal Ika* tidak hanya dipahami sebagai yang berbeda-beda itu menjadi satu. Tetapi, lebih jauh dari itu bahwa terdapat satu tujuan yang sama dari berbeda-beda itu. Seperti yang diungkapkan oleh Anies Baswedan: *“Kata terpenting dalam kalimat ‘Bhinneka Tunggal Ika’ itu adalah ‘tunggal’, yang ditegaskan dengan kata ‘ika’, diksi bahasa Sansekerta yang dalam bahasa Jawa setara dengan kata iki, iku, ataupun kuwi. Pesan kuncinya adalah menjadi tunggal, menyatu sebagai sebuah persenyawaan”*. Oleh karena itu, aneh jika kita membaca Indonesia justru dengan menekankan ‘bhinneka’. Penekanan terhadap kata ‘bhinneka’ sama saja dengan membahas hasil persenyawaan dengan memfokuskan pada unsur pembentuknya. Terlebih lagi kita sadar bahwa berbagai unsur itu menyatu bukan karena asal-usul, tapi bersatu karena kesamaan tujuan. Sehingga, Kebhinneka sebagai ciptaan dan karunia Tuhan, ditindaklanjuti dengan persatuan sebagai hasil usaha dari perjuangan manusia (Facebook Anies Baswedan, 20 Desember 2021).

Sejatinya, inilah yang menjadi landasan pengorbanan umat Islam sejak lalu. Persatuan adalah di atas segala-galanya. Perbedaan sebagai keniscayaan dari Tuhan, tetapi persatuan adalah perjuangan bangsa Indonesia yang dilatarbelakangi agama dan budaya yang berbeda-beda untuk tetap berada dalam satu-kesatuan, dalam bingkai NKRI. Pengorbanan yang dilakukan tidak hanya nyawa, bahkan prinsip (dalam artian yang masih dapat dikompromikan) pun siap dipertaruhkan demi tegaknya persatuan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, dari Sabang

sampai Meurauke.

Fenomena yang terjadi saat ini seakan-akan telah mengaburkan fakta sejarah bahwa Islam sebagai ujung tombak dalam menjaga kerukunan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi, tidak perlulah kita melihat sebab eksternal, perlu juga bagi umat Islam untuk meninjau kondisi internalnya sendiri. Benar bahwa sebagian kecil pihak dari umat Islam sendiri memiliki benih-benih sikap radikal dan intoleran. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sikap ini, diantaranya kondisi perekonomian, kesenjangan sosial, garis politik maupun ideologi yang terlanjur kaku. Sebab-sebab ini harus menjadi perhatian tidak hanya pemerintah melainkan tokoh agama yang seharusnya sebagai pencerah bagi umatnya. Sayangnya, dewasa ini bahkan tokoh agama sendiri menjadi pemicu konflik antara masyarakat dan pemerintahnya. Latahnya penggunaan media sosial menjadi salah satu pemicu tersebarnya berbagai propaganda dan berita hoaks yang kerap membuat kondisi tidak kondusif antara masyarakat dan pemerintah.

Media Sosial

Arus media sosial yang begitu gencar saat ini menjadi salah satu sebab utama dari konflik tersebut. Tidak adanya penyaringan dan purifikasi informasi seringkali menyebabkan kesalahan persepsi dan mengubah sebagian sikap atau perilaku masyarakat yang menjurus kepada anti-pemerintah, anti terhadap agama tertentu hingga mengerahkan massa untuk mendemo pemerintah. Efek jejaring media sosial luar biasa besar pengaruhnya. Apabila tidak dapat diantisipasi secara cepat dan tanggap oleh kebijakan pemerintah, hal ini dapat menimbulkan kegaduhan yang lebih besar lagi.

Memang, sebagai bagian negara demokrasi, sosial media juga menjadi ruang bebas berpendapat yang acapkali terkesan

tanpa batas-batasan tertentu. Hal ini sangat berbahaya terhadap kelangsungan harmonisasi bangsa Indonesia yang beragama agama dan budaya. Oleh karenanya, pada satu sisi tepat bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan UU ITE sebagai antisipasi kebebasan berbicara yang dapat merusak ke-*bhinnekaan tunggal ika*.

Di sisi lain, kebijakan UU ITE juga dianggap sebagai ancaman kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi ruang bagi demokrasi. Ruang ini harus tetap terisi bagi mereka yang terus memperjuangkan hak masyarakat di tengah kondisi bangsa yang carut-marut. Tentu saja UU ITE menjadi alat pemerintah untuk membatasi kebebasan berpendapat masyarakat dalam menuangkan ide dan pikirannya yang kerap kali juga melewati batas sikap sebagai cerminan bangsa timur yang beradab. Hal ini sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Yasonna Laoly (Menkumham RI) (Republika.co.id, 2021), bahwa kebijakan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta UU ITE bukanlah untuk membatasi kritik, melainkan penegas batas masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

Penegas batas inilah yang seharusnya menjadi cerminan bagi umat Islam sendiri. Benarkah tindakan aksi demo, menghina hingga melakukan pembakaran fasilitas-fasilitas umum sebagai bagian dari ajaran Islam? Jika tidak, sudah seharusnya umat Islam Indonesia juga melakukan refleksi ke dalam sebagai bagian perenungan bahwa bangsa ini juga perlu memperbaiki dirinya apabila ingin memperbaiki negeri ini. Seperti yang pernah diungkapkan oleh khalifah Islam, Ali bin Abi Thalib saat ia didemo oleh rakyatnya sendiri, *“Saat Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyatnya adalah sepertiku (yang dikenal cerdas dan taat), sementara saat aku memimpin, rakyatku adalah seperti kalian”*. Pernyataan Ali ini menunjukkan bahwa pemimpin sendiri merupakan cerminan dari rakyatnya. Sehingga, apabila umat

Islam menginginkan negeri ini maju, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah umat Islam sendiri.

Dari paparan di atas menjelaskan bahwa sejatinya Islam memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan bangsa Indonesia melalui payung moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah hal baru. Pada dasarnya Islam mengajarkan untuk selalu bersikap adil dan berhikmah. Adil dan hikmah inilah sebenar-benarnya orang yang beragama. Agama yang sejatinya sebagai jalan penuntun manusia agar tidak hidup berantakan, sudah seharusnya membuat manusia berada di jalan yang penuh dengan kebaikan. Untuk itu sebenarnya istilah moderasi beragama ini hanya sebagai stimulan atau pengingat bagi tokoh agama dan masyarakat bahwa agama seyogyanya hadir sebagai jalan penuntun kebaikan yang didalamnya tersirat sikap adil, toleran dan penuh hikmah.(*)

Moderasi Beragama Sebuah Pesan Komunikasi Pembangunan

Oleh: Heri Rahmatsyah Putra

Dosen STAIN Meulaboh

Email: herirahmatsyahputra@staindirundeng.ac.id

Secara bahasa moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah* yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah). Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai 'pilihan terbaik'. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Islam mencatat sejarah panjang dalam hidup rukun antar umat beragama dan bangsa-bangsa terdahulu.

Banyaknya penaklukan-penaklukan yang dilakukan umat Islam menoreh tinta emas untuk menjadi acuan hidup rukun beragama. Sikap keterbukaan Islam dalam melindungi antar umat beragama telah diajarkan Nabi Muhammad melalui piagam Madinah, dilanjutkan dengan penaklukan di zaman sahabat, serta dinasti-dinasti Islamiyah setelahnya. Hal ini menunjukkan semangat multikultural yang luar biasa serta perlu diimplementasikan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Hal ini menjadikan masyarakat sering diterpa isu-isu radikalisme, ekstrimisme, sikap intoleran dan lain sebagainya. Banyaknya pergerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin masiv dalam pertumbuhannya sehingga menimbulkan kegelisahan dan berbagai konflik horizontal di tengah masyarakat.

Dari sekian banyak keberagaman yang terdapat di negeri ini, keberagaman agama hadir sebagai yang terkuat dalam membentuk sikap radikalisme di Indonesia, ditengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, “Moderasi beragama” muncul sebagai sebuah inovasi yang membawa pesan dalam mensiasati perpecahan di tengah bangsa ini. Moderasi beragama menjadi kunci dalam hidup rukun di tengah pluralisme bangsa Indonesia. keberagaman dalam bingkai kebhinekaan hendaknya terjaga melalui sikap toleransi kehidupan sosial.

Kunci dalam menciptakan kerukunan maupun toleransi dalam tingkat nasional, lokal atau global adalah moderasi beragama. Penolakan terhadap liberalisme dan ekstremisme dilakukan dalam pilihan pada moderasi beragama demi tercapainya keseimbangan, perdamaian, dan peradaban yang terpelihara (RI, 2019). Dalam upaya menciptakan kerukunan tersebut, perlu adanya pemahaman terhadap nilai dari kehidupan yang moderat.

Moderasi beragama telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 pada seluruh program Kementerian dan Lembaga Pemerintahan, yang segala aspeknya akan diwarnai dengan moderasi beragama. Ketika berbicara tentang moderasi beragama tentu pemikiran kita akan mengarah pada permasalahan apa yang sebenarnya mendasari moderasi beragama ini dilakukan, permasalahan-permasalahan yang bagaimana yang perlu diluruskan didalamnya. Pertama masalah fenomena radikalisme keagamaan yang muncul (Susi, 2021).

Beragam persepsi muncul sebagai *feedback* dari pesan moderasi beragama tersebut. Adanya pandangan-pandangan tidak percaya bahwa moderasi beragama hanya dijadikan sebagai alat untuk merusak kaidah agama Islam, ada pula tanggapan yang menyebutkan menjadi moderat dalam Islam dianggap merusak akidah, dan lain sebagainya. Jika mengutip pernyataan Lukman

Hakim Saifuddin (menteri agama tahun 2014-2019) menyatakan dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya melainkan cara kita beragama hal ini karena agama sudah pasti moderat.

Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam pemahaman dan penafsiran. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrim baik ekstrim kanan maupun kiri (Susi, 2021).

Jika diamati dari fenomena tersebut masih banyak pemahaman yang keliru mengenai konsep moderasi beragama di tengah masyarakat. Maka dari itu, dalam menyebarkan konsep moderasi beragama diperlukan peran dari media komunikasi yang paling tepat agar dapat menyentuh segala lapisan masyarakat. Era digital 4.0 telah menjadikan manusia kini sangat bergantung terhadap media komunikasi. Konsep atau nilai moderasi beragama merupakan gagasan atau inovasi yang harus didifusikan agar dapat diadopsi oleh masyarakat dalam menyelesaikan krisis moderasi beragama di Indonesia.

Seharusnya konsep moderasi beragama perlu diformulasikan secara tepat sesuai kesepakatan dan kesepahaman yang baik dalam perspektif agama-agama, hal ini agar tokoh agama-agama memiliki persepsi dan cara pandang yang sama, baik secara konseptual maupun praktis, untuk disampaikan secara tepat kepada masyarakat. Dalam lembaga pendidikan pun, konsep moderasi perlu disusun secara tepat dan disampaikan secara mudah dalam keadaan formal maupun non formal pada setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian dibutuhkan proses sosialisasi moderasi beragama yang berkesinambungan kepada masyarakat luas dengan melibatkan tokoh agama, penyuluh agama, baik

melalui workshop, kajian keagamaan, dan media sosial.

Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Pentingnya keberagaman yang moderat bagi umat beragama, serta menyebarkan nilai moderasi beragama. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian.

Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antarumat beragama adalah modal dasar bangsa untuk maju. Dalam komunikasi, terdapat istilah moderator yaitu orang yang menengahi proses diskusi ataupun dialog di hadapan publik, moderator disini tidak berpihak terhadap pendapat manapun dan kepada siapapun. Tentu saja moderator harus bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut. Dengan kata lain, Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, karena sesuatu yang ada di tengah biasanya tentu yang terbaik, berada diantara dua hal yang buruk.

Konsep moderasi beragama dapat dikatakan sebagai suatu pembangunan pemahaman saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Dalam kajian ilmu komunikasi, moderasi beragama menjadi sebuah pesan bahkan inovasi yang diturunkan dari pemerintah kepada masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Maka segala hal mengenai moderasi beragama menjadi isu kontemporer dalam ranah komunikasi pembangunan.

Pakar ilmu komunikasi sepakat mengatakan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan, suatu inovasi biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen ide dan komponen objek (material atau produk dari ide). Everett M. Rogers (1985) menyatakan secara sederhana

pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa.

Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan (Mukti Sitompul, 2002).

Jika diamati, moderasi beragama tidak terlepas dari fungsi komunikasi untuk memberikan informasi, bahkan merubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalankan rutinitas keagamaan secara intern maupun ekstern. Terbangunnya sikap moderasi beragama di kalangan masyarakat akan menciptakan kerukunan yang memperkecil ruang terjadinya konflik secara vertikal maupun horinzontal. Pemerintah melalui Kementerian Agama bertindak sebagai komunikator pembangunan yang merumuskan pesan tentang moderasi beragama secara tepat agar mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi tercapainya Indonesia yang berdaulat dari gerakan atau paham-paham radikalisme dan intoleran yang berdampak kepada lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

Media Kampanye Moderasi Beragama

Perkembangan media komunikasi dan informasi telah menciptakan perubahan budaya virtual secara besar-besaran. Jarangnya tersebar koran (media cetak) sebagai media komunikasi pertama yang telah berperan besar dalam peradaban kehidupan manusia menjadi sebuah fenomena akan ketergantungan manusia

kepada media tersebut. Bahkan televisi dan radio sebagai media elektronik yang lebih canggih juga semakin ditinggalkan.

Tidak dapat dipungkiri gelombang perubahan dengan mengandalkan media sosial atau yang disebut sebagai *new media* ini dikatakan lebih efektif dalam mendifusikan segala gagasan atau inovasi. Internet dan media sosial kini telah dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang banyak digunakan untuk mencari berita apapun, kapanpun, dan dimanapun. Keterbukaan informasi yang sifatnya ringan, serius, dan penting, termasuk informasi yang berkaitan dengan agama. Peningkatan pengguna media sosial dalam praktik komunikasi keagamaan juga mempengaruhi cara beragama seseorang. Berbagai studi menunjukkan bahwa banyaknya macam praktik keagamaan mulai dari berdonasi hingga kegiatan virtual yang diyakini dapat memperkuat keimanan semakin mudah ditemukan (Hamdi, 2021).

Perkembangan media komunikasi saat ini telah membentuk kekuatan besar dalam membentuk perilaku manusia kepada kehidupan yang modern, instan, dan dinamis. Media sosial menjadi fenomena baru yang sangat digemari masyarakat modern tanpa mengenal usia dan afiliasi sosial apapun.

Mediabaru merupakan media komunikasi digital yang saling terkoneksi dalam satu jaringan. Media baru dapat digunakan untuk menyalurkan dan menciptakan berbagai informasi kepada penerima. Media baru juga dapat mempengaruhi dan merubah level dan cara berpikir masyarakat modern. Dengan kata lain, Media sosial adalah sebuah sarana interaksi sosial berbasis daring (*online*) yang terhubung dengan jaringan internet, yang berfungsi memudahkan penggunaannya untuk saling berbagi informasi atau cerita, melakukan komunikasi lewat berkirim pesan, menjalin relasi dan membuat jaringan (Kosasih, 2019).

Berkembangnya interaksi dan budaya komunikasi pada masyarakat merupakan dampak dari adanya media sosial.

Masyarakat tidak lagi hanya bisa berinteraksi secara nyata tetapi juga dapat terhubung secara maya (virtual) yang bisa dirasakan melalui teknologi digital. Media sosial atau medsos memiliki kelebihan dalam berinteraksi dan koneksi online seperti memiliki aksesibilitas, kecepatan, interaktivitas dan jangkauan sehingga membuatnya lebih kuat dari pada media tradisional. Dalam berinteraksi masyarakat menggunakan media sosial dengan menciptakan konten atau informasi yang tersedia dalam media.

Kecanggihan media sosial dapat digunakan sebagai ruang untuk mencari pengetahuan mengenai konsep moderasi beragama. Moderasi beragama (*wasathiyah*) merupakan esensi dan substansi dari ajaran agama yang sama sekali tidak berlebihan, baik dalam cara pandang atau bersikap. Dalam buku Moderasi Beragama yang ditulis oleh Tim Balitbang Kemenag RI, dijelaskan bahwa moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain.

Pada prinsipnya, sikap adil dan berimbang yang melekat pada prinsip moderasi beragama dapat membentuk seseorang untuk memiliki tiga karakter utama yaitu kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama selalu memilih jalan tengah karena lebih mudah diwujudkan, apabila seseorang memiliki keluasaan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak sehingabisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain.

Media sosial sebagai media kampanye konsep moderasi beragama menjadi saluran untuk menyebarkan pemahaman tersebut. Berdasarkan teori difusi inovasi, Penyebarluasan inovasi menyebabkan masyarakat berubah, dan perubahan sosialpun merangsang individu atau kelompok untuk menemukan dan menyebarkan hal-hal yang baru melalui media. Masuknya inovasi ke tengah sistem sosial disebabkan terjadinya komunikasi antar

anggota masyarakat dengan masyarakat lain. Dengan demikian komunikasi pembangunan merupakan faktor yang sangat penting untuk terjadinya perubahan sosial.

Dalam kampanye moderasi beragama di Indonesia, media sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat. Natalie Jomini Stroud berpendapat bahwa peran media untuk mencuri perhatian dari pengguna yang menggunakan media sosial lewat konten-konten yang telah dibagikan dalam media sosial. Media sosial (medsos) harus memainkan peran penting dalam menarik pendukung melalui berbagai informasi.

Maka dari ini media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media kampanye moderasi beragama karena pengaruhnya yang dapat mencuri perhatian dari pengguna media sosial melalui konten-konten yang dibuat dan dibagikan sebagai pendorong pergerakan atau *people power* sehingga dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk saling menghormati dan dapat menerima keberagaman sesuai dengan konteks moderasi beragama (Pratiwi et al., 2021).

Dalam menggunakan media sosial, harus berpikir dan bersikap moderat terhadap hal-hal yang beredar, terutama moderat dalam kehidupan beragama. Media sosial merupakan salah satu jalan dalam kegiatan kampanye moderasi beragama. Masyarakat harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Terlebih dengan hal-hal yang berbau masalah agama atau moderasi beragama, seperti berbagai doktrin atau berita jelek yang tersebar luas melalui media sosial. Dengan demikian, masyarakat harus bisa menyaring berbagai informasi yang masuk dan harus bersikap moderat terlebih dahulu terhadap berbagai informasi tersebut, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk mengambil sikap.

Media sosial sebagai media komunikasi pembangunan terhadap konsep moderasi beragama saat ini menjadi ujung

tombak dalam upaya menanamkan pemahaman dan perubahan sikap masyarakat agar terhindar dari sikap radikalisme dan ekstrimisme dalam beragama. Peran komunikator pembangunan dalam mengkampanyekan pesan moderasi beragama juga harus sejalan dengan hakikat moderat yang sebenarnya, dalam artian benar-benar berada di tengah dan tidak berpihak terhadap kepentingan golongan mayoritas atau menjadi senjata untuk membela pihak minoritas dalam menyuarakan kepentingan yang sudah pasti menyimpang.

Sikap moderat yang ‘sesungguhnya’ harus dimulai dari tokoh-tokoh lintas agama untuk dapat disampaikan kepada masyarakat, secara langsung maupun menggunakan media. Media sosial juga hendaknya dapat dimaksimalkan secara tepat untuk menggalakkan konsep moderasi beragama melalui pesan atau konten yang menarik dan mudah dipahami. Sehingga tidak menciptakan bias di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan rasa pesimis dan tidak percaya terhadap konsep moderasi beragama. Tidak terlepas pula pentingnya kebijaksanaan masyarakat sebagai pengguna media sosial dalam mengadopsi pesan moderasi beragama tersebut. Karena seluruh umat beragama di Indonesia memiliki peran yang sama untuk mengkampanyekan moderasi beragama. (*)

Daftar Pustaka

- Hamdi, S. (2021). *Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi*. 27(1), 1–15.
- Kosasih, E. (2019). Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 263–296. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.118>
- Pratiwi, P. S., Seytawati, M. P., Hidayatullah, A. F., Ismail, I., & Tafsir, T. (2021). *Moderasi Beragama dan Media Sosial*

- (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>
- RI, K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Si, M. U., Pul, T. O. M., & Si, M. (n.d.). *Konsep konsep komunikasi pembangunan*.
- Susi. (2021). Komunikasi Dalam Moderasi Beragama “ Perspektif Filsafat Komunikasi .” *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 4, 64.

Moderasi Beragama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Oleh: Anton Jamal

Dosen STAIN Meulaboh

Email: anton.jamal@staindirundeng.ac.id

Salah satu upaya mewujudkan moderasi beragama adalah dengan memahami ajaran Islam secara kontekstual, selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Pemahaman yang cenderung kaku dan konservatif, akan menyebabkan umat Islam mengalami kegamangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang menghendaki perubahan di berbagai bidang. Padahal umat Islam dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak hanya individual, tapi juga sosial.

Tidak hanya sebagai umat beragama, tapi juga sebagai warga negara dan bahagian dari masyarakat dunia. Di antara tantangan yang harus dihadapi adalah keinginan untuk menerapkan syari'at Islam secara *kaffah* dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Semangat yang menggebu-gebu harus sejalan dengan misi ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*. Jika tidak demikian, maka pelaksanaan syari'at Islam yang hanya didasari oleh semangat dikhawatirkan justeru menampilkan wajah Islam yang jauh dari misi utamanya.

Menyadari hal itu masyarakat Aceh melalui para tokoh dan wakilnya berupaya untuk memperjuangkan pelaksanaan syari'at Islam melalui jalur legislatif, setelah negara secara resmi mengamanatkan pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA) Tahun 2006, yang sebelumnya didahului oleh UU No

44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, dan UU No 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus.

Karena meskipun syari'at Islam telah lama menyatu dalam kehidupan masyarakat Aceh, namun untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dan mengikat di Aceh, dibutuhkan pengakuan negara. Hal ini bertujuan memastikan hukum yang berlaku di Aceh sebagai bagian NKRI tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan melalui poses legislasi yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan menghormati Hak Azazi Manusia.

Untuk mewujudkannya berbagai ketentuan dalam qanun mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberadaan non-Muslim. Dalam kaitannya dengan persoalan jinayah, terhadap pelaku jarimah non-muslim di Aceh berlaku asas penundukan diri. Ali Abubakar (2020: 78-79), menjelaskan bahwa Qanun Jinayah mengatur dua hal. *Pertama*, non-muslim yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) bersama-sama warga Aceh beragama Islam.

Dalam hal ini non-Muslim itu dapat memilih dan menyatakan tunduk dan sukarela pada Qanun Jinayah. Untuk ketentuan ini dapat dipahami bahwa 10 (sepuluh) sanksi atas jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah dapat dikenakan kepada non-Muslim jika pelaku menyatakan menundukkan diri kepada ketentuan Qanun Jinayah. *Kedua*, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetap diatur dalam Qanun Jinayah. Sehingga tidak ada unsur paksaan terhadap non-Muslim yang tinggal di Aceh untuk melaksanakan ketentuan syari'at Islam.

Secara umum berbagai ketentuan dalam qanun yang mengatur persoalan jinayah bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya peradilan jalanan. Karena tidak mustahil semangat

dalam pelaksanaan syari'at yang tidak diatur sedemikian rupa, termasuk dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan, akan berpotensi mencederai Hak Asasi Manusia, di mana setiap orang berhak menafsirkan dan menentukan sikap bahkan berinisiatif untuk mengambil alih peran peradilan tanpa melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang berbagai kasus yang diklaim sebagai kejahatan dan pelanggaran syari'at. (Anton Jamal, Noviandi Husny: 2018)

Demikian juga dalam persoalan ekonomi, hadirnya qanun Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) No 11 Tahun 2018 adalah dalam rangka mengakomodir kebutuhan tersebut. Sehingga tidak berlebihan jika berbagai ketentuan yang terdapat dalam qanun syari'at di Aceh disebut sebagai fiqh mazhab Aceh yang dipositifkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh. Dengan adanya qanun syari'at sebagai payung hukum, maka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh harus dipastikan sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan qanun, yang memiliki posisi istimewa dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalis*.

Sebaliknya hal-hal yang sudah diatur dalam qanun harus dilaksanakan, meskipun terlihat berbeda dan belum diatur dalam undang-undang. Sehingga dapat dipahami bahwa undang-undang dan berbagai peraturan lain di atas qanun berlaku secara umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, dan dalam hal-hal yang belum diatur secara khusus. Sementara khusus untuk wilayah Aceh yang berlaku adalah ketentuan qanun, setelah Aceh diberikan kekhususan oleh negara. Terlebih lagi pasca disahkannya UU PA tahun 2006 yang mengamanatkan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh, maka upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dengan menggunakan qanun sebagai payung hukumnya pada dasarnya adalah menjalankan amanah undang-undang.

Lebih dari itu ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksa-

naan syari'at yang tertuang di dalam qanun syari'ah harus memperhatikan kearifan lokal. Karena tujuan syari'at sebagaimana dikemukakan 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*litahqiq masalih al-'ibad*). Ketentuan-ketentuan hukum yang tidak mengakomodir kearifan lokal apalagi yang sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, bahkan tidak mustahil justru akan menyebabkan banyak ketentuan hukum yang ditinggalkan atau dilanggar, karena masyarakat sulit untuk meninggalkan tradisi dan budayanya.

Pada sisi lain kearifan lokal dapat diharapkan menjadi sarana pendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, karena telah menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Contoh adanya peradilan adat yang pada dasarnya menganut prinsip musyawarah dan kekeluargaan, adalah sarana yang seringkali digunakan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan perselesaian, sengketa yang terjadi di antara mereka. Termasuk memberikan sanksi sosial dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ringan, sebelum kasusnya di bawa ke peradilan. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh memberikan ruang bagi lembaga Adat untuk menjalankan fungsinya.

Dalam hal ini peradilan adat di Aceh tidak menjalankan fungsi yudikatif, namun sebagai pranata sosial dan pranata adat, pengadilan adat diakui eksistensinya secara formal dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pengadilan Adat Mukim sebagaimana pengadilan adat gampong berwenang menyelesaikan 17 perselisihan/sengketa adat, (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid; (3) perselisihan antar warga;

(4) khalwat; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian ringan dalam keluarga; (7) perselisihan harta *sehareukat*; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di pasar; (12) penganiayaan ringan; (13) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (14) fitnah, hasutan dan pencemaran nama baik; (15) pencemaran lingkungan (skala ringan); (16) macam-macam; (17) sengketa/perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dasar penyelesaian di peradilan adat ini menurut Syahrizal Abbas (2009: 235) juga bersumber dari hukum adat yang memang sudah tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat ini memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian hukum adat merupakan juris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.

Dalam rangka mengakomodir kearifan lokal, qanun-qanun syari'at termasuk dalam hal akidah dan ibadah cenderung tidak memberikan penjelasan yang bersifat detail dan rinci. Pada umumnya hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang yang relatif luas kepada masyarakat untuk mewujudkan ekspresi, sarana, dan model pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dikecualikan pada hal-hal yang telah disepakati, dan diketahui secara luas kewajiban untuk melaksanakannya serta berdampak terhadap kehidupan sosial umat Islam (membutuhkan peran pemerintah/ulil amri), seperti ketentuan tentang *'uqubat* terhadap umat Islam yang tidak melaksanakan kewajiban shalat jumat tiga kali berturut-turut setelah dinasehati dan diberikan peringatan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Al Yasa' Abubakar (2008: 48),

bahwa mereka ini diketahui tidak melaksanakan shalat Jum'at, karena berada di tempat umum atau di tempat terbuka. Sedangkan mereka yang berada di dalam rumah atau tempat tertutup tidak akan diganggu apalagi dipaksa, karena memasuki rumah tanpa izin atau mengintip orang di dalam rumah adalah perbuatan dosa dan sampai pada batas tertentu akan menjadi jarimah pula. Karena itu mereka yang berada di dalam rumahnya atau di tempat tertutup lainnya (misalnya warung kopi yang sedang tutup) ketika orang lain sedang menunaikan shalat Jum'at di mesjid-mesjid tidak akan diganggu dan tidak dapat dihukum. Dengan demikian unsur mengganggu ketentraman umum dalam penggalakan dan pengaturan ibadah, adalah pertimbangan penting dalam penjatuhan hukuman (di samping harus mengandung unsur melawan Allah dan Rasul-Nya).

Meskipun pada dasarnya ibadah seperti shalat adalah persoalan individu seorang muslim dengan Rabb-nya, akan tetapi pada shalat jumat ibadah tersebut bukan hanya merupakan kewajiban individu. Karena inti pelaksanaan shalat jumat tersebut ada pada jama'ahnya, tanpa jama'ah shalat jumat tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan puasa. Bagi orang Islam yang makan minum di tempat/di depan umum di siang hari Ramadhan di pidana dengan hukuman ta'zir. Hal ini juga berlaku terhadap setiap orang/badan usaha menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i. (Qanun No 11 Tahun 2002)

Alasan shalat jumat dan ibadah puasa perlu diatur sebagai bagian dari perbuatan pidana adalah pertimbangan sosiologis; sebab bila tidak diatur demikian, maka kedua ibadah penting tersebut tidak mendapat perhatian yang sewajarnya dari masyarakat. Padahal, perintah untuk melaksanakan shalat jumat misalnya, adalah perintah wajib yang penekannya bersifat khusus, sampai-sampai Allah memerintahkan untuk meninggalkan segala

jenis kegiatan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Selain itu kedua ibadah ini memiliki nilai syi'ar yang tinggi. (Alyasa' Abubakar, Marah Halim, 2007:62)

Dengan kata lain pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bukan merupakan bentuk penerapan syari'at Islam secara *taken for granted*, bahkan dalam banyak hal berbeda dengan ketentuan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Upaya adaptasi dengan kearifan lokal dan sistem hukum negara-bangsa inilah wujud dari moderasi Islam di Aceh (melalui pelaksanaan syari'at Islam). Terutama persoalan yang membutuhkan peran serta pemerintah dalam pelaksanaannya, seperti ibadah yang memberikan dampak sosial, serta penerapan *uqubat hudud* dan *ta'zir* dalam persoalan jinayah.

Karena kenyataan ini, upaya yang dilaksanakan di Aceh sekarang ini menurut Al Yasa' Abubakar (2008: 64), dari segi landasan filsafat metodologis atau epistemologis keilmuannya dan begitu juga dari segi tata hukum dan sistematikanya (karena berada dalam negara-bangsa), dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pelaksanaan syari'at Islam "betul-betul baru" (merumuskan sebuah fiqh baru) yang belum ada preseden dan modelnya, baik dalam sejarah panjang umat Islam di masa lampau atau dalam realitas kehidupan masyarakat (negara) muslim internasional sekarang ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek moderasi beragama yang diharapkan hadir dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, diawali dari pemahaman terhadap syari'at Islam dan penerapannya yang kemudian dituangkan dalam qanun. Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan Al Yasa' Abubakar (2008: 56-57), setidaknya mengacu kepada empat prinsip, yaitu: *pertama*, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam qanun bersumber dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah. *Kedua*, penafsiran atau pemahaman atas Alqur'an dan sunnah, dikaitkan dengan keadaan

dan kebutuhan lokal, serta tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI, dengan menjadikan khazanah kebudayaan Islam pada masa lalu sebagai bahan baku dan pembanding, sehingga pemikiran baru yang dihasilkan tetap berakar dan tersambung dengan sejarah masa lalu. *Ketiga*, penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan berorientasi masa sekarang dan masa depan, serta mampu menyahuti “semangat “ zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM, kesetaraan gender serta kemauan ilmu penegetahuan dan teknologi. *Keempat*, dilengkapi dengan kaidah fiqh yang dijadikan sebagai pedoman dan dikenal luas yaitu: *al-muhafazhah ‘ala qadim al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah* yang artinya: tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih relevan serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.(*)

Pluralisme Agama Kaum Sufi

Oleh: Ramli

Dosen STAIN Meulaboh

Email: ramli@staindirundeng.ac.id

Sejak awal kehadirannya, agama Islam sebetulnya telah mengisyaratkan bahwa satu agama untuk seluruh ummat manusia adalah satu hal yang mustahil (Syahrin Harahap, 1997:279). Kenyataan menunjukkan bahwa manusia lahir, berkembang dan menulis sejarah keberagaman. Dan salah satu keragaman yang paling sering menimbulkan konflik dan pertikaian sepanjang sejarah adalah keragaman agama. Untuk itu, perlu ditanamkan kesadaran akan keragaman tersebut guna menyadarkan manusia akan nilai fitrahnya dan menjadikan manusia bijak dalam menyikapi perbedaan dan bersikap.

Tulisan ini kemudian mencoba hadir untuk sedikit menyentuh aspek kesadaran beragama tersebut dalam kerangka yang dicoba kerucutkan. Disini, penulis mencoba menggunakan istilah pluralisme agama untuk menerjemahkan kesadaran akan keragaman dan sedikit menggali perspektif kaum sufi dalam memberi kontribusi bagi upaya-upaya penguatan kesadaran akan pluralitas agama.

Secara sederhana, Alwi Shihab pluralisme agama sebagai berikut : *“Pluralisme Agama adalah, bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan dalam kebihnekaan (Alwi Shihab, 1999: 340).”*

Dari defenisi yang diberikan oleh Alwi Shihab dapat ditarik beberapa komentar. Pertama, bahwa pluralisme agama harus

menjadi kesadaran aktif tiap pemeluk agama. Sehingga persoalan ini bukan saja menyentuh agama tertentu (misalnya Islam) tapi juga menyentuh umat lainnya. Bahkan lebih jauh lagi, kesadaran pluralisme agama harus menyentuh setiap individu, setiap kita yang memiliki ruh dan perasaan.

Kedua, bahwa pluralisme agama tidak berbicara persoalan teologi dimana kita dianggap mengakui kebenaran agama lain, tapi lebih kepada pengakuan kita pada eksistensi, keberadaan dan kesadaran bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Jadi tidak tepat jika pluralisme agama dapat merusak akidah, tapi justru ini menunjukkan keluasan akidah. Kepercayaan kita kepada kuasa Allah, bahwa jika ia berkehendak ia akan menjadikan semua manusia beriman (QS Yunus, 10:99), tapi hal itu tidak dilakukan semata-mata untuk menunjukkan kuasa dan kehendak Allah.

Ketiga, perlu adanya keterlibatan setiap individu dalam agama-agama untuk saling memahami perbedaan dan persamaan. Studi agama-agama menjadi penting untuk mendukung kesalingpahaman ini. Sehingga tidak ada lagi yang menyebut “*Muhammad sebagai nabi yang doyan kawin*” atau “*Yesus bidannya siapa*.” Kesibukan masyarakat akhir-akhir ini pada aksi saling hina agama mengindikasikan bahwa kita tidak saling mengerti. Perlu ada kajian-kajian masif lintas agama untuk semakin memperkuat usaha-usaha perdamaian, kerukunan dan kebhinekaan. Karena kita tahu, bahwa setiap agama dimaksudkan untuk membawa kepada keselamatan.

Kesadaran tersebut menjadikan kita dapat duduk berdampingan dengan pemeluk agama lain dan sama-sama membangun keharmonisan. Diharapkan dengan pemahaman pluralisme yang tepat, tidak akan ada lagi pertikaian dan pertentangan yang hanya membuang-buang waktu dan menciptakan ketegangan. Sehingga kita bisa dapat membangun

bangsa (dan tentunya agama) dengan lebih baik lagi.

Menurut Alwi Shihab, dalam menyikapi perbedaan agama seorang harus mengambil jalan tengah. Ia melarang seorang untuk bersikap ekstrim, fanatik dan tidak toleran. Menurutnya, sikap ekstrim membuat seorang akan seenaknya menuduh orang lain sesat, bid'ah atau kufur. Tindakan demikian menurut beliau adalah bentuk lain dari kegagalan dakwah karena malah akan membuat orang lain jauh dari Islam (Alwi Shihab 1999:256-257).

Dalam Al-Qur'an disebutkan *"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (QS. Yunus, 10:99) "Dan katakanlah: Kebenaran itu datanginya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. (QS. Al-Kahfi, 18:29)." "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah, 2:256)."*

Abdullah Yusuf Ali mengomentari ayat-ayat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya dan menyatakan bawah pemaksaan bertentangan dengan semua agama. Beliau mengemukakan alasan dengan mengajukan argumen sebagai berikut: *"Pertama*, agama tergantung iman dan kemauan, dan semua itu tidak ada gunanya jika orang lain didesak dengan kekerasan untuk mengikuti agama tertentu. *Kedua*, dalam tinjauan teologi, kebenaran dan kesesatan sudah demikian jelas. *Ketiga*, perlindungan Tuhan bersinambungan dan kehendak-Nya selalu membimbing kita keluar dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang (Syahrin Harahap, 1997:279)." Bagaimana mungkin kita bisa mengajak

orang lain untuk mengikuti ideal ideal Islam seperti *tasammuh* (toleransi), *i'tidal* (moderasi), dan *adl* (keadilan), jika kira sendiri gagal memperlihatkan nilai-nilai tersebut dalam hubungan dengan umat dari agama yang berbeda.

Para sufi –dalam memahami pluralisme agama- mengambil jalan yang lebih ekstrim. Para sufi bukan hanya sekedar memaklumi keberadaan agama lainnya. Akan tetapi mereka meyakini bahwa ada kebenaran mendasar dalam setiap agama. Menurut mereka, semua agama pada hakikatnya berasal dari Allah SWT. Walaupun mereka hanya menisbahkan kebenaran tersebut kepada agama-agama besar (agama samawi).

Robert Frager menuliskan: “Kebanyakan para sufi meyakini bahwa terdapat kebenaran mendasar dari seluruh agama. Agama-agama besar memiliki inti ajaran yang sama. Beragam nabi dan guru spiritual bagaikan bola-bola lampu yang menyinari ruangan. Bola lampu tersebut berbeda-beda, namun sinarnya berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan (Frager, 1999:12).”

Zavad Nurbakhsy menyebutkan bahwa keluasan pengetahuan merupakan hikmah Allah. Tidak ada yang mempengaruhi eksistensi Allah selain selain hati. Karena setiap wujud kehidupan mengetahui Wujud Tuhannya dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, tetapi hati manusia dapat mengenal dia secara keseluruhan (Nurbakhsy, 2008:163). Sufi yang mendapatkan hikmah dan pengetahuan ‘irfani dapat mengenal tuhannya dengan sempurna mampu bersikap bijak dalam kehidupan dan toleran dalam menghadapi perbedaan, khususnya perbedaan agama dan keyakinan.

Karen Arsmstrong menyebutkan: “*Kita tidak pernah melihat Tuhan kecuali Nama personal yang telah diwahyukan dan diberi eksistensi kongkrit dalam setiap diri kita; tak terheringga lagi bahwa pemahaman kita tentang Tuhan pribadi kita sendiri diwarnai oleh tradisi keagamaan tempat kita dilahirkan. Namun*

seorang mistik ('arif) mengetahui bahwa 'Tuhan' kita ini sebenarnya adalah 'Malaikat' atau symbol ilahi yang particular, yang tidak semestinya disamakan dengan 'Realitas Gaib itu sendiri. Akhirnya ia memandang semua agama yang berbeda-beda sebagai teofani-teofani yang sah. Jika Tuhan agama yang lebih dogmatik memilih umat manusia kedalam kubu-kubu yang saling bermusuhan, Tuhan kaum mistik justru menjadi kekuatan pemersatu (Armstrong, 2003:318).”

Para sufi akhirnya meyakini bahwa dalam beragama, seorang tidak boleh memaksakan kepercayaannya kepada orang lain. Para sufi meyakini bahwa manusia mempunyai hak untuk mencari dan menemukan Tuhannya. Setiap manusia adalah saudara dan harus diperlakukan layaknya seorang saudara. Oleh karena itu, bagi kaum sufi, toleransi merupakan tugas manusia beragama karena sebenarnya pluralitas dan perbedaan semua berasal dari Allah. Inilah yang mereka maksud dengan Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Hamzah Fansuri menyakini bahwa jika seseorang telah mencapai makrifat, dia tidak akan lagi melihat kepada perbedaan-perbedaan sebagai sebuah masalah. Mereka akan memandang bahwa perbedaan (apa yang oleh sebagian kelompok ekstrimis dianggap sebagai hitam-putihnya suatu kebenaran atau kesalahan) merupakan kehendak Tuhan yang Maha Rahman. Oleh karenanya, sepatutnya dalam menyikapi perbedaan tersebut prilaku 'rahman' lebih didahulukan.

Hamzah Fansuri juga menulis “*Jika ma'na dirimu dapat akan dalil- Tiada berguna mazhab dan sabil.*” Dari pernyataan tersebut beliau ingin mengatakan bahwa jika seorang telah diberi pengetahuan ruhani (makrifat) maka ia akan mendapati jalan terang menuju Tuhan tanpa harus mempertentangkan mazhab dan metodologi. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Abu Hafs yang dikutip oleh Imam Al-Qusyairy: “*Sejak diriku mencapai makrifat, tiada lagi kebenaran atau kebathilan yang merasuki hatiku*

(Qushairi, 391).” Karena telah sampaikan cahaya universalitas kebenaran dalam batin mereka.

Hamzah dalam kesempatan lainnya menuliskan: *“Rahman itulah yang bernama Wujud; Keadaan Tuhan yang sedia ma’bud; Kenyataan Islam, Nasrani dan Yahud; Dari Rahman itulah sekalian Maujud.”* Kalimat ini cukup eksplisit menyatakan sikap Fansuri terhadap perbedaan agama. Dari kalimat *‘Kenyataan Islam, Nasrani dan Yahud serta Dari Rahman sekalian Maujud’*, beliau seolah menyampaikan pesan bahwa keberagamaan agama, merupakan manifestasi dari sifat Rahman Tuhan. Pluralitas menurut beliau adalah sebuah keniscayaan, manifestasi (*maujud*) dari Yang Maha Rahman (Allah). Oleh karena itu, hendaknya kita menyikapinya dengan pendekatan rahman (kasih sayang). Bukan dengan jalan kekerasan.

Hamzah dalam kesempatan lain, menuliskan: “Jika terdengar olehmu firman; Pada Taurat, Injil Jabur dan Furqan; *Wa Huwwa ma’akum* pada Al-Quran; *Bil kulli syai’in muhit* ma’nanya ‘iyan.” Hamzah Fansuri dalam sya’ir tersebut mengutip dua penggalan ayat al-Qur’an, *Wa huwwa ma’akum* (QS. Al-Hadiid, 50: 04) dan *Bil kulli syai’in muhit* (QS. Fushilat, 51: 54). Melalui kutipan tersebut Hamzah jelas mengatakan bahwa Allah SWT meliputi segala sesuatu dan Tuhan selalu ada dalam diri segala sesuatu, baik itu Islam maupun non Islam.

Hamzah Fansuri dalam *Zinat Al-Wahidin* berkata: *“Karena itu, maka menurut ahli hakikat, semua makhluk juga merupakan bagian dari diri kita. Semua manusia adalah saudara kita, Islam maupun kafir. Begitu juga kekasih dan istri kita (semuanya adalah sama). Begitupun bisa dan tawar, surga dan neraka, murka dan ampunan, baik dan jahat, kaya dan miskin, puji dan cela, kenyang dan lapar, kecil dan besar, mati dan hidup, sakit dan nyaman, benar dan salah, semuanya adalah sama dalam dirinya. Makna kalimat, “Ainama tuwallu fatsamma wajhullah (Q.S. Al-Baqarah, 2:115)” itu*

sangat jelas kepadanya. Barang siapa yang mendapatkan makna *aynama*, niscaya apapun yang ia pandang, niscaya Allah juga yang dilihatnya. *Wallahu A'lam*.

Ibnu Arabi berkata: “*Hatimu mampu menerima berbagai bentuk; Biara bagi sang rahib, kuil bagi arca-arca; Padang rumput bagi rusa-rusa, penziarah bagi ka’bah; Lembaran Taurat, Al-Qur’an ; Cinta adalah iman yang kujunjung kemanapun menuju; Unta-untanya; iman yang benar adalah imanku* (Armstrong, 2003:314).” Jalaluddin Rumi juga berkata: “*Aku bukan seorang Kristiani; bukan Yahudi, bukan pula Majusi; Aku bahkan bukan seorang Muslim* (Danar Zohar dan Marshal, 2007:9).

Dalam Al Qur’an dituliskan : “*Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan supaya mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma’afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu* (Al-Baqarah, 02:109)

Ayat tersebut mengatakan bahwa kita harus memaklumi berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Seorang muslim tidak boleh radikal memandang kebenaran diri sendiri dan memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Ibnu Arabi seperti yang ditulis oleh William, C. Chittick (61) acapkali mengutip ayat Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa, ‘*Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Tuhan.*’ Pemujaan ini katanya didasarkan pada pengetahuan ‘Tuhan’ yang dimiliki oleh setiap dan masing-masing makhluk. Makhluk memuji Tuhan sejauh dia mengetahui-Nya.

Syekh Bawa menyebutkan: “*Anda seorang Nasrani karena anda beriman kepada Yesus. Anda seorang Yahudi karena anda mempercayai semua nabi termasuk di dalamnya Musa. Anda seorang muslim karena anda beriman kepada kenabian*

Muhammad. Anda seorang sufi karena anda mempercayai ajaran universal cinta Tuhan. Anda sungguh bukan semua itu, karena anda beriman kepada Tuhan. Dan begitu anda beriman kepada Tuhan, maka tak ada agama. Begitu anda memilah-milah diri berdasarkan agama maka anda berpisah dari sesama manusia (Michael Gren dan Coleman Barks, 2000:18).”

Tasawuf yang ajarannya menitik pada kedalaman hakikat seperti ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap bersama yang sehat, mengakui segi-segi kelebihan orang lain dan mendorong sama-sama melakukan kebaikan dalam masyarakat. Perbedaan yang ada, diterima dalam kerangka perbedaan tanpa mempertentangkannya (M. Amin Syukur, 2004:25). Kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang masih belum memeluk Islam. Nabi mencontohkan ketika beliau dilempari oleh penduduk Thaif, dan Jibril berkata bahwa ia bisa membinasakan penduduk thaif jika Nabi mau, Nabi Muhammad SAW malah menolaknya. Beliau hanya berdo'a kepada Allah supaya penduduk thaif memperoleh petunjuk (Husain Muhammad, 2012:48).

M. Yatimin Abdullah menyebutkan bahwa etika terhadap sesama manusia adalah mutlaq dilakukan oleh seseorang tanpa terbatas oleh waktu, kondisi, tempat, agama dan budaya. Beretika adalah fitrah manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain (M. Yatimin Abdullah, 2006:343). Rumi mengatakan bahwa cinta merupakan asas dan sumbu suatu peradaban dan kebudayaan. Tanpa cinta, suatu peradaban dan kebudayaan akan rapuh dan runtuh. Cinta, dalam arti luas dan hakiki, membentang dari cinta Tuhan, Nabi, sesama, insan, ummat, bangsa, tanah air, keluarga, lawan jenis, anak-istri, kampung halaman, pekerjaan, keadilan, hukum, tradisi intelektual, dan nilai-nilai kebudayaan- yang semua itu merupakan bagian dari diri kita (Abdul Hadi, 2000:171). (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, W.M, *Islam; Cakrawala, Estetik dan Budaya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000
- Abdul Hadi, W.M, *Hamzah Fansuri; Risalah Tasawuf dan Puisi-puisinya*, Mizan, Bandung
- Abdul Qasyim Al-Qusyairi An-Naisabury, *Risalah Al-Qusyairiyah*, terjemahan Muhammad Luqman Hakim, Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Amatullah Armstrong, *Khazanah Istilah Sufi; Kunci Memahami Dunia Tasawuf*, Mizan, Bandung, 1995.
- Danar Zohar dan Marshal , *SQ (Spiritual Intelligence): The Ultimate Intelligence*, Terjemah, Rahmani Astuti dkk, Mizan, Bandung, 2007
- Hamzah Fansuri, *Al-Muntahi....*dalam Abdul Hadi, W.M, L. K Ara, *Hamzah Fansuri; Penyair Sufi Aceh*, Lotkala, Jakarta, 1984.
- Hamzah Fansuri, *Zinat Al- Wahidin....* dalam Abdul Hadi, W.M, *Hamzah Fansuri; Risalah Tasawuf dan Puisi-puisinya*, Mizan, Bandung, 2005.
- Husein Muhammad, *Sang Jahid; Mengarungi Sufisme Gusdur*, Lkis, Yogyakarta, 2012.
- Khan Sahib Khaya, *Cakrawala Tasawuf*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- Michael Gren dan Coleman Barks, *Sholat di Mata Sufi; Anugerah terbesar dari Allah*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000.
- Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarh Muraq al-'Ubudiyah*, Haramain, Surabaya, 2008.
- M. Amin Syukur, *Tasawuf Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2006
- Simuh, *Mistik Islam Kejawen; Raden Ngambehi Ragawarsita*, UI-Press, Jakarta , 2002.

Moderasi Beragama dari Pinggir

Simuh, *Tasawuf dan Perkembanganya dalam Islam*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002

Moderasi Beragama dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Oleh: Syukri

Dosen STAIN Meulaboh

Email: sukri@staindirundeng.ac.id

Akhir-akhir ini situasi yang berkembang tampaknya agak kontradiktif, dimana pemahaman masyarakat dipersempit tentang pemahaman beragama. Perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat mudah dijadikan seseorang atau kelompok untuk saling menghujat tentang agama masing-masing sehingga menimbulkan perpecahan. Sedangkan Indonesia sebagai negara demokratis dan konstitusi menjamin kebebasan beragama kepada semua orang sesuai agama atau keyakinannya masing-masing. Konstitusi juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (kondisi tersebut juga merupakan prinsip pertama Pancasila sebagai filosofi Negara Indonesia).

Bila merujuk pada hipotes Soekarno, permasalahan ini dapat dipecahkan dengan menyadarkan bahwa setiap agama pada dasarnya mempunyai satu Ketuhanan tertinggi. Indonesia yang sejak dahulu kala merupakan negara dengan berbagai keberagaman agama, suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Hal tersebut tentunya sangat mudah untuk ditopangi oleh oknum-oknum yang memecah dengan indikasi intoleran. Salah satu keberagaman yang menjadi isu sentral dalam intoleransi adalah keberagaman agama. Faktor sensitifitas kehidupan beragama dan segala hal yang terkait dengan sentimen keagamaan. Hal itulah yang melahirkan pemikiran mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk mengkampanyekan “**Moderasi Beragama**”.

Dalam berbagai kesempatan beliau selalu mengatakan bahwa Moderasi Beragama adalah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Hal tersebut merupakan jalan tengah untuk tetap mempertahankan warisan budaya nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (local wisdom).

Secara bahasa Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *Moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: *Pertama*, pengurangan kekerasan, *Kedua*, penghindaran keekstreman. Dan secara istilah moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Moderasi beragama secara luas bukan suatu prinsip memoderasi agama, karena pada dasarnya agama telah memoderasi dirinya sendiri dengan prinsip berkeadilan dan keseimbangan, serta mentaati kesepakatan berbangsa yang dikukuhkan konstitusi. Agama apapun selalu mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan kerusakan kezaliman,

atau kemungkarannya.

Pada intinya moderasi beragama adalah bagaimana cara pandang seseorang untuk berada pada kondisi yang tidak berlebihan dalam memandang pemahaman agamanya untuk tidak terlalu ekstrem, tidak adil pada sesama, dan tidak berlebihan dalam memahami perbedaan antara satu dengan lainnya. Moderasi beragama sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Hal ini disebabkan, keberadaannya mampu mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menekankan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama.

Ada empat hal yang menjadi esensi moderasi beragama. *Pertama*, cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan. Yang *kedua*, terkait dengan pengamalan esensi agama, yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Yang *ketiga*, semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan. Dan *kempat*, taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragam. Maka, kita perlu memoderasi cara kita beragama karena belakangan ini disinyalir adanya **Tiga** hal yang menjadi fenomena yang berkembang.

Pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu sendiri. Cara beragama yang eksklusif misalnya, padahal beragama itu inklusif. Cara beragama yang segregatif, yang memisah-misahkan padahal beragama itu adalah integratif, menyatukan kita. Cara beragama yang konfrontatif misalnya, senang untuk bermusuhan, berlawanan. Lalu, cara beragama yang destruktif, padahal beragama harusnya konstruktif. Ini adalah kecenderungan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian.

Kedua, juga disinyalir semakin dirasakan tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama. Muncul tafsir-tafsir

yang justru bertolak belakang dengan esensi agama itu sendiri. Misalnya jihad, jihad direduksi dengan makna yang hakikatnya kondisional, sangat situasional, lalu digunakan untuk kondisi damai secara umum sesuatu yang bertolak belakang tentu.

Ketiga, kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan. Misalnya politisasi agama, penyeragaman terhadap hal yang beragam dan lain sebagainya. Maka, moderasi agama diperlukan agar cara pandang, sikap keagamaan kita bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, dan tidak ekstrem.

Berakitan dengan hal tersebut, maka penulis memiliki pandangan bahwa untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat (organisasi keagamaan atau komunitas). Hal tersebut dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat (organisasi keagamaan atau komunitas) ialah sebagai proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki kehidupan berdasarkan kearifan lokal yang ada. “Proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Dengan demikian pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya

(kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

Selanjutnya Madhekan Ali (2007 : 86) mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu perangkat ampuh untuk mobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreatifitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan daya dan kekuatan masyarakat (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan atau komunitas) dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau

berpartisipasi melalui berbagai aktifitas.

Keterkaitan moderasi beragama dalam pemberdayaan masyarakat (organisasi keagamaan atau komunitas) yaitu pada konsep pemberdayaan masyarakat dibidang sosial budaya. Konsep pemberdayaan masyarakat (organisasi keagamaan atau komunitas) dibidang sosial budaya merupakan upaya penguatan kelompok masyarakat melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan dan norma-norma serta mendorong terwujudnya organisasi keagamaan atau komunitas yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan ekstrem yang jauh dari moralitas.

Secara eksplisit dalam rangka mewujudkan hal tersebut, nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya, artinya rumusan moderasi beragama dalam pemberdayaan masyarakat (organisasi keagamaan atau komunitas) harus mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai kerjasama, keputusan kelompok, tanggung jawab sosial, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya secara bersama. Dengan pertimbangan tersebut maka moderasi beragama dalam pemberdayaan masyarakat (organisasi keagamaan atau komunitas) akan memiliki nilai strategis, dimana setiap kegiatan yang dilakukan dimasyarakat, harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai adat dan keyakinan yang mereka anut. Demikian halnya dengan keputusan yang diambil adalah keputusan kelompok yang menuntut kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia didalam kelompok itu sendiri.

Dalam aspek perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat (organisasi keagamaan atau komunitas) adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek prinsipil dari manusia dan lingkungannya. Aspek tersebut yaitu sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan

dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai adat istiadat, norma, agama dan sosial budaya. Pelaksanaan program-program pemberdayaan tentu saja tidak terlepas dari proses perencanaan. Misalnya, dengan diharuskannya penyusunan proposal sebagai prasyarat pendanaan. Dilakukannya perencanaan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, memudahkan koordinasi dan kontrol hingga membantu dalam membuat keputusan dan mencapai tujuan bersama dalam pelaksanaan program.

Perencanaan pemberdayaan masyarakat yang baik dilakukan dengan memahami masalah yang terjadi secara menyeluruh dan kontekstual, kemudian menetapkan logika berpikir sedari awal perencanaan yang dapat diwujudkan dalam logical framework. Langkah-langkah tools tersebut dilakukan untuk memastikan program dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Akhirnya dalam merencanakan pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan dengan cara memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, serta membangun partisipasi masyarakat dengan membuka sebanyak-banyaknya kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan, memperbaiki dan memilih jalan untuk mencapai kesejahteraan sebagai gambaran kemandirian masyarakat yang berdaya.(*)

Moderasi Beragama di Era New Media

Oleh: Rahmalia Usman

Dosen PTI Al Hilal Sigli

Keragaman etnis, budaya, agama dan kearifan local yang dimiliki Indonesia, menjadikan negara ini dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Realitas masyarakat yang multikultur ini menjadi sebuah anugerah sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia untk mampu mengelola komunikasi dengan bijak agar tidak mempertajam perbedaan, namun mencari persamaan dan mengutamakan persatuan

Strategi Komunikasi di Era New Media¹

Strategi komunikasi penyampaian informasi kerap kali dilakukan melalui media. Media mampu menyampaikan informasi dan pesan-pesan secara massif dalam waktu singkat. Atas nama kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan menyebarkan informasi, media masih terikat dengan system pemberitaan yang bersifat *social resposibility* dalam penyampaian berita kepada masyarakat, jangan sampai melanggar norma-norma yang bisa menjadi delik pers.

Media memiliki peran besar dalam menyebarkan dan menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, baik itu informasi secara umum maupun pesan-pesan keagamaan. Proses penyampaian pesan ini bertujuan memberi informasi, mempengaruhi pola berfikir, mengubah sikap dan perilaku seseorang.

Pemerintah, ulama, masyarakat dan awak media harus

¹ New Media, media teknologi informasi atau media digital yang menyediakan platform bagi penggunaanya secara informative dan interaktif.

bersinergi untuk mengawal dan menjalankan proses penyebaran informasi agar tidak bersifat eksklusif dan tanpa disadari memihak salah satu pihak. Aktor yang terlibat dalam penyebaran informasi harus lebih bijak dalam penyebaran berita untuk menghindari konflik yang kerap terjadi di sekitar kita.

Kemudahan mengakses informasi di era new media ini merupakan sebuah kemajuan besar, dan media-media yang ada saat ini harus bisa menjadi medium pemersatu bangsa, jangan sampai media menjadi corong menyebarkan paham-paham intoleran, ekstremisme, hoax dan paham-paham radikalisme.

Isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat saat ini meresahkan sebagian pihak, hal ini mendorong pemerintah dan pihak terkait mengkonstruksi ulang pemikiran tentang keagamaan, salah satu konsep yang diusung pemerintah adalah Moderasi Beragama untuk meminimalisir ekstremisme dan eksklusifitas yang memicu konflik di masyarakat.

Kebutuhan informasi di era new media mendorong penyebaran informasi semakin luas kepada khalayak ramai. Hal ini menempatkan media memainkan peran penting dalam masyarakat. Peran strategis media ini harus melalui beberapa regulasi terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)², sehingga media dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

Selama ini Islam menjadi objek dari makna bias berbagai tindakan makar yang terjadi. Acapkali akibat stigma yang dituduhkan, umat Islam dan ajaran Islam sendiri selalu menjadi kambing hitam dari berbagai tindakan intoleran, kekerasan, dan radikalisme negatif lainnya. Klaim kebenaran dan sikap ekstrem dalam beragama akan memicu gesekan-gesekan sosial yang dapat menimbulkan perpecahan.

Di belahan ‘dunia lain’ sangat nyinyir dan gencar menyebarkan Islamophobia, mereka melabeli Islam dengan ‘the

² Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum

moors', bar bar, Islam yang identik dengan kekerasan, perang, intoleran, dan begitu banyak tuduhan-tuduhan negatif lainnya. Label-label negatif tersebut menggiring sebagian orang untuk lebih memilih menjadi agnotis atau ateis.

Fanatisme agama kerap terjadi, klaim kebenaran atas ajaran agama tertentu sangat subjektif, perbedaan interpretasi dan penolakan secara arogan terhadap perbedaan pemahaman, bahkan orang-orang seagama sekalipun, memiliki penafsiran yang berbeda terhadap ajaran agamanya (mazhab, sektarian, dll).

Tindakan kekerasan yang terjadi pada kenyataannya dilakukan oleh oknum tertentu, namun stigma negative selalu melekat pada Islam dan Umat Islam. Agama itu sesuatu yang sacral, maka para oknum pelaku makar ini sudah seharusnya ditatar dan diberi pemahaman tentang moderasi beragama, tidak terjebak pada ekstremisme, intoleran, dan radikalisme.

Moderasi itu menekankan pada cara beragama bukan agama itu sendiri. Bagaimana perspektif kita dalam beragama terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara tidak berlebihan, tidak ekstrem, tidak mengamalkan agama secara radikal. Konsep ini dapat membangun sikap tasamuh untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Komitmen ini nantinya mampu berpihak pada kemanusiaan, egaliter, keadilan dan berimbang.

Cara memahami dan mengamalkan agama secara moderat³ merupakan sikap yang sangat dewasa yang membawa kita memiliki cara pandang yang luas, tidak terjebak ke kanan atau ke kiri. Selama ini konflik-konflik *laten* yang bermunculan mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman tentang saling menghormati pihak yang memiliki perbedaan keyakinan, atau perbedaan tafsir atas ajaran agama itu sendiri.

Munculnya paham-paham konservatif akan menyebabkan

³ Tidak berlebihan, pertengahan, sedang. Pandangan atau sikap moderat untuk mencoba mengambil posisi netral atau tengah terhadap keragaman keyakinan

kesatuan bangsa goyah karena perbedaan. Penyampaian gagasan moderasi beragama memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keutuhan keberagaman dalam masyarakat. Sebagai negara Pancasila (Pancasila menjadi titik temu semua ideologi) yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, penyampaian informasi melalui media harus mengusung nilai-nilai kemanusiaan, netral dan edukatif, dan tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang memprovokasi munculnya ekstremisme dalam masyarakat

Kontribusi media di tengah gagasan moderasi beragama sangat dibutuhkan agar gagasan ini dapat disebarluaskan, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Praktisi media mampu memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan media harus memberitakan informasi yang berimbang tentang isu-isu agama (cover both side).

Moderasi 'ideal' Beragama

Indonesia terbentuk sebagai bangsa multikultura, dan keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh masyarakat. Budaya mengalami proses transisi, budaya menjadi bagian dari agama atau sebaliknya, akulturasi budaya ini tidak lantas menggerus esensi dari ajaran agama itu sendiri. Komitmen kebangsaan yang kuat, sikap toleransi terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal, dan menghargai tradisi dan budaya local masyarakat Indonesia yang beragam.

Memilih jalan tengah (wasith) diantara dua kubu fanatik dan tidak berlebihan merupakan sikap beragama paling ideal. Memahami dan mengamalkan agama secara moderat adalah salah satu komitmen yang perlu direalisasikan oleh bangsa kita sebagai negara yang majemuk, sikap ini menjadi penengah (wasathiyah) dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama.

Konsep Moderasi beragama itu sendiri bukan untuk melawan sesuatu yang ekstrem atau radikal dalam beragama, namun bagaimana mengkonstruksi sikap pertengahan, -tidak berlebihan-yaitu sikap wasathiyah (upaya menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama) dalam beragama. Prinsip moderasi ini merupakan nilai yang ditawarkan Islam berupa keadilan yang menekankan nilai yang menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat.

Menciptakan harmoni kehidupan yang damai dan seimbang, menjunjung tinggi toleransi sebagai pondasi awal terbentuknya sebuah masyarakat yang egaliter. Sebagai ummatan wasathan: *“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”* (QS. al Baqarah: 143). Ummat pertengahan (ummat pilihan), umat yang tidak berlebihan dan tidak ekstrem dalam hal apapun. Umat Islam harus menjadi pelopor akan realisasi moderasi Islam yang mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan sikap.

Moderat sering disalahpahami dalam konteks beragama di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendirian, tidak taat, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Menjunjung tinggi ide-ide moderasi beragama dianggap bersikap liberal dan mengabaikan nilai-nilai sakral dalam agama. Mereka yang beragama secara moderat sering dihadapkan dengan dengan kelompok yang dianggap konservatif.

Moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau ubudiyah (hal pokok agama) dengan mereka yang berbeda keyakinan atau beda penafsiran terhadap ajaran agama. Moderasi beragama juga bukan alasan

bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara menyeluruh (kaffah). Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti esensi ajaran agama yang dipeluknya mengajarkan prinsip menghormati orang yang berbeda keyakinan dengannya.

Dengan adanya kepercayaan (trust), tumbuhnya sikap saling percaya antara individu dan antar institusi dalam masyarakat, adanya hubungan yang erat dalam membangun solidaritas yang mampu merekatkan hubungan social untuk membangun modal social dalam masyarakat. Menerima keberagaman secara terbuka bukan berarti menggadaikan marwah dan martabat agama yang kita yakini (lakum diinukum waliyadain), sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman suku dan antar pemeluk agama, menjadi landasan pondasi penting dalam menjalin hubungan sosial-kemasyarakatan, baik politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, maupun lainnya.

Ketika manusia terjebak hawa nafsu, mereka sering mengatasnamakan Tuhan dan agama demi memenuhi kepentingannya. Esensi agama itu sendiri adalah kedamaian, keseimbangan, dan keselamatan dalam hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam penyebaran agama, teks-teks agama mengalami multitafsir baik karena perbedaan bahasa, maupun karena perbedaan wilayah.

Dalam perspektif moderasi beragama, agama menjadi inspirasi bagi umatnya untuk berkontribusi dalam membangun peradaban dan pembangunan bangsanya. Menerima secara terbuka akan keberadaan orang lain. Moderasi beragama untuk mempertahankan prinsip manusia yang ber'adab', berpikir rasional terhadap perbedaan, memiliki sikap rendah hati, dan keberadaan kita memberi manfaat terhadap orang lain.

Gesekan-gesekan emosi akibat perbedaan tersebut pasti terjadi, beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga termasuk dalam beragama.

Beruntungnya kita hidup dalam keberagaman yang dipersatukan oleh satu bahasa –Bahasa Indonesia-, dengannya segala sesuatu dapat dikomunikasikan untuk diambil jalan tengah.

Keragaman itu memang kehendak Tuhan, Islam mengakui perbedaan tersebut sebagaimana termaktub dalam al Qur'an: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal"* (QS. Al-Hujurat: 13). Allah Swt. menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain, agar hidup kita lebih dinamis, tidak statis seperti robot dengan remote controlnya.

Dengan realisasi moderasi beragama diharapkan akan menghindari konflik dalam masyarakat. Strategi sosialisasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui penyampaian gagasan, pemahaman yang bijak terhadap keragaman. Moderasi beragama memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keutuhan bangsa yang majemuk.

Indonesia merupakan negara yang heterogen dan multikultural, bukan negara berazaskan agama tertentu, namun tidak memisahkan agama dari kehidupan warganya. Agama hidup bersamaan dengan budaya dan kearifan local masyarakatnya yang mampu menjadikan warganya hidup toleran, beradab dan menghargai sesama.

Sebagian masyarakat yang tergolong moderat dalam menghadapi persoalan agama lebih mengutamakan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, karakter, dan identitas Islam rahmatan lil alamin daripada menggunakan kekerasan dalam penyelesaiannya masalah. Konsep 'umat pertengahan' harus menyentuh realitas kehidupan publik sebagai solusi ideal dalam beragama dan menciptakan keragaman yang inklusif.

Tokoh Lintas Agama Terdepan Menjaga Keharmonisan

Oleh: Rusmadi

Jurnalis Harian Rakyat Aceh

Email: rusmadiruslan@gmail.com

Dalam Alquran Surat Ali 'Imran: 104, yang artinya Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para ulama sepakat bahwa surat Ali Imran diwahyukan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Artinya, surat Ali Imran termasuk dalam ayat yang turun ketika Nabi SAW bersama para sahabat fokus pada penerapan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Berbeda dengan Nabi SAW ketika di Mekah yang berfokus pada memperkenalkan tauhid dan memperkuat akhlak.

Kita sepakat, tokoh lintas agama terdepan dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Yang namanya tokoh sudah pasti orang yang memiliki pengetahuan di bidang tersebut. Meski pun masyarakat punya peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama khususnya di Aceh.

Penulis melihat dan merasakan umat minoritas tidak risih tinggal di Aceh dan berdampingan akur dengan umat muslim, kalau pun ada hanya sebagian kecil terjadi gesekan seperti di Aceh Singkil. Pembangunan rumah ibadah yakni gereja bagi umat khatolik dan Kristen tetap mengacu pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Dan qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016.

Konflik pembangunan gereja terjadi setelah adanya regulasi PBM, yakni dua menteri tersebut. Di mana jamaah Kristendan Khatolik tidak menerima aturan dari PBM hingga di akhir tahun 2021. Penulis, mendapatkan informasi dari Sekretaris Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Aceh, Juniazzy, M. Pd, di mana hampir berakhirnya tahun 2021, musyawarah dan mufakat satu satunya jalan untuk mencari titik temu.

Bila belum ada titik temu, bila dilakukan ke tahap pengadilan, sudah pasti bicara hitam putih, kalau bukan menang ya kalah. Juniazzy, Kakankemenag Kota Subulussalam ini, menyampaikan persoalan ini sudah terjadi sejak 2015, untuk menyelesaikan sedikit persoalan pascapenertiban rumah ibadah.

Pemerintah Aceh juga tidak tinggal diam persoalan ini, sehingga pada bulan November 2020 membentuk tim Percepatan Penyelesaian Perselisihan Pendirian rumah ibadah, yang diketuai Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Tim yang dibentuk pemerintah Aceh ini terus bekerja dengan melakukan musyawarah dan mufakat, sehingga konflik yang terjadi tidak berkepanjangan. Tidak semua Kabupaten/Kota di Aceh ada penduduk atau dihuni oleh non muslim, hanya ada di Kota Banda Aceh, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara.

Dalam tulisan ini, ingin disampaikan begitulah keharmonisan mereka minoritas hidup aman dan nyaman tinggal di negeri serambi mekkah ini. Begitu pun bagi non muslim yang apabila melanggar qanun jinayat maka bisa memilih, apakah memilih dihukum cambuk atau penjara.

Masyarakat Aceh dengan pengetahuan itu pula tentu sama-sama ingin merasakan ketentraman hidup rukun dan damai, tidak ingin ada persoalan yang berujung pada konflik. Tidak bisa dipungkiri, orang Islam sudah pasti memiliki ego terhadap agamanya sendiri, begitu juga non muslim, memiliki rasa ego kepada agamanya.

Di dalam alquran surat Alkafirun ayat 6, dituliskan lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu untuk ku agamaku. Ini jelas, Tuhan sudah mengaturnya, tinggal kita bagaimana menjaga hubungan sosial dengan baik, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Bukankah ketika kecil kita belajar saat di Sekolah Dasar (SD), diajarkan nilai nilai pancasila yakni, Ketuhanan yang maha Esa. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita juga sepakat, bila adanya masalah dan konflik mengharapkan masukan dan ide ide cemerlang dari berbagai elemen masyarakat, untuk memberikan solusi. Namun bila memberikan minyak bensin dan memanaskan-manaskan persoalan lebih baik untuk tidak terlibat.

Penulis secara pribadi, sangat welcome siapa saja komunitas, LSM atau kelompok lain yang ingin terlibat dalam memberikan solusi. Ketika kaum muslim mendukung pembangunan gereja bagi non muslim, maka akan dicap sebagai pendukung kristenisasi, ini juga sebuah masalah yang dilematis. Untuk itu, sebagai negeri yang menerapkan syariat Islam, supaya terus menjaga dan merawat toleransi. Upaya ini tentu butuh komitmen dan sinergi dari berbagai pihak, baik suku maupun agama.

Hemat penulis, sekarang kita jangan jauh-jauh, di internal Islam saja terkadang masih saling menyalahkan hanya karena beda mazhab dan pendapat. Walaupun kita tahu bahwa perbedaan adalah rahmat, namun untuk menerima perbedaan terutama dalam melaksanakan beribadah, baik pakai qunut maupun tidak pakai qunut.

Belum lagi, di bulan ramadan, tatacara salat tarawih ada yang 23 rakaat sekalian witir dan ada juga 11 rakaat dengan witir. Mengenai jumlah rakaat salat tarawih selalu muncul ketika

bulan puasa. Ada yang bilang 23 rakaat dapat pahala yang besar, sedangkan 11 rakaat tidak sah dan dianggap mengada ngada. Untuk mengenai ini tentu ada ahlinya yang bisa menjawabnya.

Yang sangat kita sesalkan adalah isu-isu seperti ini yang dapat memancing emosi kelompok lain, padahal sesama Islam. Belum lagi, kenduri hidup, kenduri mati, pakai tahlilan atau tidak, salawat dengan sir atau zihar. Hal hal ini juga terkadang masih belum tuntas tuntasnya dibicarakan.

Bahkan di bulan puasa dan mau masuk 1 syawal, ada yang menggunakan hisab dan ruqyah, semuanya ini dilakukan orang-orang yang profesional dan berkompeten. Artinya, kalau ini terus diperdebatkan dan bisa menimbulkan konflik, di mana kita letakan moderasi beragama. Atau pemahaman kita yang masih kurang atau kita tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Dalam pribahasa, jangan seperti gunting yang bisa berjalan lurus akan tetapi bisa memisahkan, jadilah jarum walaupun menyakitkan tetapi menyatukan.

Disamping itu, para stakeholder juga diharapkan memberikan contoh yang baik bagi rakyat atau bagi apa yang dipimpinnnya. Sebab ada oknum misalnya, yang mempunyai jabatan dan kekuasaan supaya tidak semena mena atas pendiritaan rakyatnya. Bagaimana rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan dan kekuasaan, ketika sedikit saja berbuat salah langsung di hukum. Jadi siapa yang salah, rakyat atau penegak hukum yang belum berlaku adil bagi rakyatnya. Sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, tidak menginginkan mata pisau itu hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Semuanya sama di hadapan hukum.

Keberagaman Dalam Menjaga Toleransi

Sebagai masyarakat Aceh yang hidup dalam keberagaman, baik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), bagaimana

hal itu semua kita rangkai dengan sunnatullah. Tidak saling menyalahkan yang berujung pada konflik dan perpecahan dan akhirnya pertumpahan darah.

Dengan keberagaman itu pula kita dituntut untuk membiasakan diri bias beinteraksi satu dengan yang lainnya, tanpa saling menyalahkan. Sebagai warga yang baik, tentu sangat menjaga toleransi, hal ini sesuai apa yang kita mudah ucapkan, Bhineka Tunggal Ika (walaupun berbeda beda tetap satu jua).

Selain itu, tidak asing lagi dengan pepatah, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Mari kita perkuat paham toleransi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, sebagaimana ayat 3 pada nilai pancasila. Sikap toleransi sebagai kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tidak saling menyalahkan karena tidak sesuai dengan keinginan kita.

Ingat, konflik yang berkepanjangan dan bisa menimbulkan perpecahan yang dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya dua pihak saja yang bertikai. Sebab, bila rakyat bertikai dan akan berakibat pada perpecahan maka Negara diharapkan hadir untuk menyelesaikannya.

Keberagaman di Aceh, tidak jauh beda dengan daerah lain yang ada di Indonesia, termasuk dalam adat budaya dan seni. Hal ini sebagai kearifan local dalam menjaga nilai nilai agama di tengah masyarakat. Meski pun adat budaya jangan sampai bertentangan dengan agama, sehingga tujuan untuk seseorang untuk mendapatkan ridhaNya akan diperoleh.

Dengan kearifan local ini pula masyarakat Aceh tidak mudah terpancing dari isu isu yang belum jelas sumbernya yang dapat berakibat fatal dan dirugikan tetap diri kita sendiri. Tidak perlu merasa sikap bahwa kita adalah orang yang hebat dan bisa semudahnya bersuara lantang yang akibat hukuman didapat akibat perbuatan itu.

Banyak kasus yang dialami teman- teman kita karena tidak

bisa menahan emosi, hakim menjatuhkan hukuman kepada dirinya dan siapa yang dirugikan kalau sudah seperti ini. Memang kita juga teringat keluarganya bila sudah jauh anak dengan ayah yang sedang menjalani hukuman penjara.

Sebut saja studi kasus, di masjid Oman Lamprit, seorang pemuda baru- baru ini hakim menjatuhkan hukuman penjara ssebagai terpidana selama 3 bulan hanya karena persoalan agama dan dapat menyakiti hati orang lain.

Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini, paling tidak kita lebih berhati hati dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dalam memposting di media social. Dalam memposting sesuatu di media social yang dapat menyudutkan orang lain lebih baik tidak usah berkomentar, bisa dikenakan undang –undang ITE. Bisa menshare dan komentar di medsos yang penting saja.

Share yang penting saja bukan yang penting share, yang akibatnya dapat merugikan diri kita sendiri. Apalagi dunia maya yang begitu terbuka dan dapat diakses semua orang saat ini. Untuk itu, FKUB yang sudah ada di Kabupaten/kota di Aceh dapat terus bekerja dalam menjaga kerukunan dan perdamaian yang sudah berjalan di bumi serambi mekkah. FKUB yang dibentuk dari Kementerian Agama sebagai organisasi upaya menjaga kerukunan antar umat beragama.

Tak hanya FKUB, ada beberapa organisasi yang konsen tentang Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), atau ada organisasi tentang pembelaan hak hak wanita, atau Forum Pembela Ummat, dengan organisasi ini harus betul betul dalam menyelamatkan dan melihat dari dua sisi, tidak boleh satu sisi. Sehingga, keputusan yang diambil sejalan dan dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.

Jadi, kesimpulannya, sebagai masyarakat Aceh yang cinta damai, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mau menjadi orang pertama membuat keonaran apalagi menyebarkan

hoaks, sebab hoak ini juga sumber konflik. Perdamaian yang sudah berjalan kondusif di Aceh hendaknya sama-sama dapat dijaga.

Bila terjadi konflik antar agama yang rugi bukan hanya dua pihak namun banyak pihak yang dirugikan. Lebih lebih lagi mengenai agama sangat sensitive, untuk itu marilah sama-sama menjaganya dan menahan diri jangan sampai terjadi konflik hanya karena perbedaan. (*)

Wasathiyah atau Moderasi Beragama Ada di Tengah Kita

Oleh: Assauti

Alumni SKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: assauti.wahid@gmail.com

Semakin lama istilah *wasathiyah* atau moderasi semakin ngetop akhir-akhir ini. Tetapi, Perlu kita kembali akar katanya, apa itu moderasi atau wasathiyah itu sendiri?. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio*, yang artinya adalah Kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi mengandung dua pengertian yaitu 1. Pengurangan kekerasan, dan 2. Penghindaran keekstreman, sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah.

Orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (ratarata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan serta watak. Baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*. Yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah*

diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

Kata *wasith* bahkan sudah diserap atau dipakai ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘wasit’ yang memiliki tiga pengertian, yaitu: penengah, perantara misalnya. Dalam perdagangan, bisnis dan peleraian, pemisah, pendamai antara yang berselisih dan serta pemimpin di pertandingan. Beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama sedangkan agama itu sendiri mengandung arti, sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu (KBBI 2020) .

Agama di duniaini bukanlah satu akan tetapi banyak. Di Indonesia agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Secara Bahasa Beragama berarti menganut (memeluk) agama. Misalnya, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Beragama berarti beribadat dan taat kepada agama serta baik hidupnya atau akhlaknya. Menurut agama yang dianut dalam kehidupan ini.

Contoh : Ia datang dari keluarga yang beragama. Beragama berarti sangat memuja-muja, menyembah dan ritual. Gemar sekali pada mementingkan “kata percakapan”. Contoh: mereka beragama pada harta benda. Secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar dan kasih sayang. Kapan pun, dimanapun dan serta kepada siapapun kepada makhluk ciptaan Tuhan. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan.

Agama hadir ditengah-tengah kita agar harkat, derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan serta meniadakan satu

dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun dan kapan pun. Beragama itu kalau dianalogikan moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu. Cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.

Menjaga, menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri dan menjaga jagat raya ini. Jadi Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan serta perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Tentu perlu ada ukuran, batasan, Dan serta indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang. Baik itu sikap dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. baik di tingkat lokal, nasional dan maupun global. Pilihan pada moderasi dengan

menolak ekstremisme, liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan serta terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan atau kewajiban utuh menjaga keutuhan tanah air yang dicintai.

Jangan Dipahami Wasathiyah Secara Matematis

Jadi, jangan pahami wasathiyah secara matematis bahwa di tengah itu adalah baik. Walaupun itu ada benarnya. Untuk melihat wasathiyah atau moderasi beragama yang terbaik dengan ukuran agama. Saya akan memberikan sebuah contoh. Apa yang bersifat ekonomis itu yang terbaik. Belum tentu. Anda naik pesawat di derajat ekonomis berbeda dengan di bisnis dan berbeda dengan di firs kelas.

Allah berfirman telah memilih orang-orang untuk disertai, diamanatkan dan diwariskan kitab suci. Mereka itu ada tiga tingkatan. Ada yang menganiaya diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada yang berlomba-lomba untuk mencapai kebajikan. Yang mana paling baik. Bukan yang di tengah, berarti bukan yang di tengah yang terbaik. Semua baik tetapi yang ada terbaik.

Nah begitu. Tidak semudah itu, begitu kita katakan yang di tengah itu baik. Kita harus melihat. Bagaimana kondisi yang dihadapi?. Jadi. Untuk menerapkan moderasi beragama itu dibutuhkan pengetahuan. Tahu kondisi masyarakat dan taulah kebutuhan masyarakat. Karena itu untuk menerapkannya wasathiyah atau moderasi beragama diperlukan pengetahuan tentang ajaran agama dan sekaligus pengetahuan tentang kondisi yang sedang dihadapi. Tanpa mengetahui itu. Tidak akan bisa, akan timbul kecacatan atau peyimpangan dalam memahami atau

menjalankan wasathiyah atau moderasi beragama dalam hidup bernegara.

Di sini definisi atau makna wasathiyah berbeda di Indonesia dengan belahan negara lain di dunia ini. Maka, sebabnya hukum yang ditetapkan oleh ulama-ulama berbeda-beda. Masyarakat di Madinah. Dimana Imam Malik ada itu beda dalam sekian banyak dalam hal ketetapan hukumnya dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata misalnya zakat fitra harus dikeluarkan dari bahan makanan pokok. Imam Abu Hanifah tidak berpendapat demikian. Dengan uangpun boleh. Sudah beda. Tetapi, intinya sama, prinsip dasar dari wasathiyah bagi seluruh umat Islam itu sama.

Apa itu Ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan Nabi Muhammad Saw adalah Nabi dan Al-quran itu benar ada hari kemudian. Itu adalah prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh berbeda. Kalau kita berbeda-beda soal-soal itu qunut, itu tidak qunut, ini dua puluh dan ini delapan. Semua itu bisa ditampung oleh wasathiyah sebagai jalan di tengah. Sehingga terhindar konflik dalam beragama. Dalam menjalankan wasathiyah diperlukan kunci utama yaitu mempunyai pengetahuan dan jangan emosi keagamaan.

Misalnya. Ada dua orang emosi keagamaan sedemikian tinggi, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena terlalu beragama. Buka puasa matahari terbenam dalam pandangan Imam Syafi'i ya begitu. Kita tambah sedikit atau diulur ke jam tujuh baru buka puasa. Ini dinamakan emosi keagamaan terlalu tinggi tanpa dasar ilmu agama Islam yang mendalam dan serta keinginannya terlalu terdorong emosi atau ambius dalam hidup beragama. Ini sungguh berbahaya di dalam hidup beragama.

Ada orang menjalankan agama mencapai puncaknya. Itu yang terbaik. Ada orang yang melaksanakan ajaran agama di

tengah. Ada orang yang melaksanakan dalam bentuk minimal dan ada orang emosional melaksanakan ajaran agama tingkat tinggi. Bisa jadi ia lahir sikap atau perilaku menunduh yang melaksanakan agama minimal ini tidak beragama dengan baik. Ada berkata orang-orang memakai jingkrang itu tidak benar keberagamaannya. Dan pakai jenggot itu tidak benar keberagamaannya. Serta pakai cadar tidak baik keberagamaannya. Jangan berkata seperti itu. Itu disebabkan karena dorongan emosi keberagamaan dan sebaliknya juga begitu.

Berlebihan-lebihan dalam agama itu juga salah satu contoh melanggar wasathiyah. Agama ada batas-batasnya. Ada batas minimal dan ada batas maksimal kurang batas dari minimal dianggap mempergampang lebih dari batas minimal dianggap ekstrem. Beda ekstrem dan melampaui batas, ekstrim sampai ke ujung, hulur berarti melampaui batas.

Misalnya, seandainya ada sarung harga normalnya, katakanlah seratus ribu, kalau Saya membeli sarung itu di atas harga normal, seratus lima ribu. Apakah itu nama mahal atau tidak...?. Kalau dalam batas agama itu sudah mahal. Karena melebihi batas. Kalau anda berwudhu ada batas minimalnya. Satu kali maksimal tiga. Karena ini air banyak pakai empat. Boleh tidak...?. Walaupun belum sampai buang air begitu banyak.

Jadi. Ada ukuran-ukuran, yang mau melaksanakan agama dalam ukuran minimal, silahkan. Kan orang-orang beda-beda sesuai dengan kemampuannya. Yang mau melaksanakan agama ukuran maksimal, silahkan. Jangan lebihkan jangan kurangkan.

Sekarang orang bicara ini bukan wasathiyah, ini wasathiyah. Ini orang semacam ini tidak tahu persoalan wasathiyah. Sedangkan ulama berkata. Kalau saya berbicara tentang kemudahan agama orang tuduh saya tidak beragama. Misalnya. Saya berikan contoh. Jangan salah paham. Kalau anda ada mendesak di jalan, belum shalat. Anda perkirakan Saya tidak akan sampai di rumah Magrib.

Boleh enggak Saya gabung shalat dzuhur dan asar. Ada yang itu bilang tidak boleh dengan alasan kan ada waktunya zuhur dan asar.

Saya berkata boleh. Karena itu kemudahan yang diberikan oleh agama selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Itu kemudahannya. Ada yang berkata itu tidak boleh. Agama beri kemudahan. Kalau ada berjalan ke najis pakaian anda sedikit ditoleransi atau tidak. Ditoleransi. Terlalu banyak kemudahan beragama yang diberikan oleh agama Islam. Dalam kehidupan di muka bumi fana ini ada nama saudara seagama dan saudara kemanusiaan. Maka. Dilarang memaki, menyingung dan berkata kotor atau memberikan gelar yang menyakiti dan lain sebagainya.

Sekarang di Eropa gereja dijual atau dialihkan menjadi Masjid bagi umat muslim dalam menjalankan rukun Islam yang kedua untuk menyikapi itu semua, perlu wasathiyah atau moderasi beragama di dunia ini. Khususnya di tanah air Indonesia.(*)

Literasi Santri Dalam Memahami Moderasi

Oleh: Miftah Ulya

Dosen STAI Diniyah Pekanbaru

Email:miftah@diniyah.ac.id

Islam sebagai agama terakhir memiliki banyak ciri khas yang membedakan dari agama lain. Ciri khas Islam yang menonjol adalah *tawwassuth*, *ta'adul*, dan *tawazun*. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang berdekatan, atau bahkan sama. Oleh karena itu, tiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi *wasathiyah*. (Afiuddin Muhajir).

Wasathiyah atau moderasi dalam KBBI memiliki makna pengurangan kekerasan. Sementara secara istilah adalah pandangan hidup yang mengedepankan sikap toleran, berada ditengah diantara pemahaman yang berseberangan untuk tidak mendominasi sikap dan sifat yang akan diambil (Amin, 2014). Moderat mengutamakan kemaslahatan umat, daripada fanatic pada salah satu pemahaman. Dalam artian moderasi akan mengambil sifat tengah tengah antara ultra-konservatif dan ekstrem liberal (Asrori, 2020)

Dalam konteks ini secara umum bahwa Kementerian Agama memberikan empat indikator moderasi beragama yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi terhadap sesama atau antar agama, anti kekerasan terhadap sipapaun dan akomodatif terhadap budaya lokal demi menjaga lestarynya budaya Indonesia. Keempat indicator ini digunakan sebagai barometer keberhasilan moderasi yang ada di Indonesia. (Balitbang, 2019)

Salah satu faktor pendukung penyebaran Islam moderat ialah melalui jalur pesantren. Islam moderat ini lebih mengedepankan ajaran agama Islam *rahmatan lil 'alamin*. Pesantren merupakan

suatu lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat strategis dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren sendiri mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat dikarenakan peran yang diberikan pesantren sudah begitu banyak dalam kehidupan berbangsa dan pengembangan kebudayaan masyarakat.

Menurut Abdul Rohim, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sejak ratusan tahun lalu, pesantren juga merupakan lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pendidikan yang unik dan mempunyai ciri khas serta karakteristik yang menjadi pembeda, sehingga saat ini menunjukkan kapabilitasnya yang cemerlang melewati berbagai episode zaman. Pesantren tradisional sudah banyak memberikan andil dan kontribusi yang sangat luar biasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghasilkan komunitas intelektual (Abdul Rahim, 2001)

Menurut Raharjo sistem pendidikan pondok pesantren melahirkan jiwa yang menjadi karakter yang belum pernah dibangun oleh sistem pendidikan manapun, karakter tersebut tertanam dalam jiwa pesantren yaitu persaudaraan, tolong menolong, persatuan, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan serta pluralitas. (Mustafa Rahman, 2011)

Pemaknaan Khalaf dan salaf pada istilah pesantren sudah tidak asing lagi. Dimana pesantren *salaf* merupakan lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan. Sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan, yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum kepada para santrinya.

Pendidikan pesantren dapat menumbuhkan budaya damai dan sikap moderat. Hal ini terlihat dari karakter Islam yang bersifat

moderat karena pada umumnya pesantren memiliki karakter yang *tawasuth* yang berarti pesantren tidak mengakomodasi paham-paham radikal yang mengarah pada gerakan terorisme. Kiprah dunia pesantren ditengah-tengah masyarakat sudah mampu mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan ajaran Islam. Karakter moderat tersebut tidak bisa dipisahkan dengan sistem pendidikan Islam, pesantren banyak menunjukkan sifat terbuka dan tidak menutup diri dalam hal pendidikan yang di implementasikan dalam pengajian kitab-kitab *at-turats* atau klasik sebagai literasi kaum santri dalam merperkokoh hujjah dan dalil mereka.

Literasi Santri dalam Memahami Moderasi

Sebagaimana dimaklumi bahwa pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Secara etimologis, “pesantren”, berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat santri; asrama tempat santri belajar agama; atau dikatakan pula, pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam (Ahmad Fauzan)

Dengan kata lain bahwa pesantren merupakan suatu tempat dimana para santri belajar pada seorang kyai/ustadz untuk memperdalam atau memperoleh ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Penyebutan istilah salah dan khalaf dalam tradisi pesantren sudah tidak asing lagi. Bahwa Pesantren *Salaf* adalah sebutan bagi pondok pesantren yang mengkaji “kitab-kitab kuning” (kitab kuno). pesantren *salaf* identik dengan pesantren tradisional yang berbeda dengan pesantren *khalaf* dalam hal metode pengajaran

dan infrastrukturnya. Di pesantren *salaf*, hubungan antara Kyai dengan santri cukup dekat secara emosional. Kyai atau ustadz secara langsung dalam menangani para santrinya

Pesantren *salaf* merupakan pesantren yang melakukan pengajaran terhadap santri-santrinya untuk belajar agama Islam secara khusus tanpa mengikutsertakan pendidikan umum di dalamnya. Kegiatan yang dilakukan biasanya mempelajari ilmu-ilmu agama dengan menggunakan kitab-kitab kuning (klasik), menggunakan metode tradisional seperti hafalan, menerjemahkan kitab-kitab saat berlangsungnya proses belajar mengajar

Dalam dunia ke-santri-an sumber rujukan yang paling utama sebagai bahan bacaan sehari-hari adalah *kutub at turats* atau kitab klasik yang berbahasa Arab, disamping literasi yang pokok al-Quran dan al-Hadis, sudah tidak menjadi asing dikalangan santri.

1. Al-Quran

Al-Qur'an menjelaskan secara mendasar, arah pemikiran *washathiyah* dalam kehidupan umat Islam di aneka ayat dalam Al-Qur'an. Dari isyarat Al-Qur'an ini lahirlah pandangan-pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam pada setiap lini kehidupan umat Islam.

Dalam salah satu ayat QS. Al-Baqarah: 143 dijelaskan *Wasathiyah* bermakna sikap adil dan pilihan, yang maknanya;

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143).

Al-Qurthubi berkata: *wasathan* dalam ayat di atas adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil”. Sementara Ibnu Katsir berkata: *wasathan* dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas”. Ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sa'diy dan Rasyid Ridha

menafsirkan bahwa makna *washathan* dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan”.

Ibnu ‘Asyur dalam tafsirnya *At-Tahrir Wa At- Tanwir*, mendefinisikan kata "*wasath*" adalah nilai- nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Adapun makna "*ummatan wasathan*" pada surat al- Baqarah ayat 143 di atas adalah umat yang adil dan terpilih. Maksudnya, umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlakunya, paling utama amalnya. Allah swt. telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain. Oleh sebab itu, mereka menjadi "*ummatan wasathan*", umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti.

2. Al-Hadis

Kaum santri dalam memahami prinsip moderasi tak lepas dari unsur hadis Nabi saw yang terkait dengan makna *wasathiyah* Islam. Dalam *As-Sunnah*, *Washathiyah* ternyata telah diucapkan dan dilafadzkan oleh Nabi Muhammad saw dalam sabdanya, yang dapat dimaknai secara bahasa. Nabi yang perbah menyebut *wasath* bermakna keberkahan, terbaik dan seimbang seperti hadits berikut:

Dapat disarikan arti hadis *Wasathiyah* yang bermakna posisi tengah penuh keberkahan;

Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: "*Apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tegahnya, sesungguhnya berkah itu turun dibagian tengah*" (HR. Ibnu Majah. Hadits No. 3268).

Hadits di atas menjelaskan tentang adab makan, bahwa mengambil makanan hendaknya dimulai dari pinggirnya lalu bagian lainnya. Hal itu dilakukan oleh sebab Nabi saw sedang

mengajarkan umatnya bagaimana makanan menjadi berkah dan mencukupi untuk orang banyak walaupun makananya sedikit, dengan cara terlebih dahulu mengambil bagian pinggirnya dan membiarkan tengahnya, karena keberkahan makanan diturunkan oleh Allah swt melalui bagian tengah makanan. Dalam hadits lain Nabi saw bersabda: “*Makanan untuk dua orang akan mencukupi tiga orang dan makanan untuk tiga orang akan mencukupi empat orang*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini kata *wasath* bermakna posisi tengah, posisi yang selalu diberkahi Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada pada posisi tengah antara kecenderungan ekstrim pada dunia dan kecenderungan ekstrim pada akhirat sehingga melupakan dunia. Islam pada posisi tengah dalam hal ekstremisme kanan yang *ghuluw* (berlebihan) pada nilai-nilai ruhani dan ekstremisme kiri yang tidak peduli pada rohani. Islam memposisikan diri berada di tengah kedua ekstrimisme itu dengan penuh keadilan dan keseimbangan.

3. Kitab At Turats

Sumber setelah al-Quran dan al-Hadis dalam kelaziman yang menjadi rujukan dikalangan santri adalah bacaan dari kitab klasik. Tidak lengkap rasanya bila tidak mengemukakan dan merujuk dari kitab turats secara khusus pandangan Ulama terkait wasathiyah ini, sehingga secara epistemologi wasathiyah atau moderasi Islam secara konsep dan definisi telah final dan tidak dapat ditolak oleh narasi apapun. Berikut adalah konsep dan pengertian wasathiyah (Moderasi) dalam pandangan ulama, yang dirujuk dalam kitab at-Turats/klasik.

a. Kitab karya Imam Ibnu Jarir At-Thabari (W: 310H/923M)

Imam Ibnu Jarir At-Thabari adalah Syaikhul mufassirin, beliau telah menulis tafsir *bilma'tsur* (berdasar riwayat) terlengkap di dunia pada abad ke 3 hijriah. Tafsirnya menjadi rujukan para ulama tafsir di masanya sampai saat ini. At-Thabari telah memberi konsep *wasathiyah* yang lengkap dan mumpuni, saat manafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143, sehingga menjadi referensi para ulama wasathiyah sampai saat ini.

At-Thabari berpendapat bahwa umat Islam yang *wasathiyah* adalah “Umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustai Tuhan dan kafir pada-Nya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam beragama, maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat *washatha* atau moderat”.

Itulah kehidupan dua umat yang tidak moderat dalam beragama, Yahudi terjerembab dalam jurang penyelewengan yang menyebabkan murka Allah yang abadi pada mereka, karena kelancangan dan sikap bebas mereka merubah ajaran Allah. Sementara kelompok nashrani yang tekstual, kaku serta *ghuluw* (ekstrem) dalam memperaktekan ajarana agama dalam bentuk kerahiban menolak dunia, menyebabkan mereka terperosok dalam jurang kesesatan abadi jauh dari hidayah Allah swt.

b. Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W: 505H/1111M)

Diantara Ulama besar yang telah memperkenalkan prinsip-prinsip wasathiyah Islam yang oleh kaum santri dijadikan rujukan dalam memahaminya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau berpendapat dalam kayanya "*Thya Ulumiddin*" ketika membahas sikap para Sahabat Nabi saw terhadap dunia pada bab Zuhud, Al-Ghazali berkata: "bahwa para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia tapi untuk agama, para sahabat tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak. Sehingga mereka tidak ekstrem dalam menolak dan menerima, tapi mereka bersikap antara keduanya secara seimbang, itulah keadilan dan pertengahan antara dua sisi yang berbeda dan inilah sikap yang paling dicintai oleh Allah swt".

Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani dan antara materi dan spiritual. Walaupun Al-Ghazali dikenal dengan pandangan tasawufnya dan kehidupan zuhudnya, namun beliau tetap mengakui dan meyakini bahwa manhaj hidup yang paling sempurna dan sesuai dengan hakikat ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta model hidup para Salaf shaleh adalah arah *wasathi* (moderat) bukan manhaj *ghuluw* (ekstrem) atau ta'thil (meninggal) ajaran Islam.

Pada pembahasan tentang Uzhlah (mengasingkan diri dari manusia untuk ibadah) Al-Ghazali membahas sangat luas dan mendalam antara keutaman uzlah dan berinteraksi dengan manusia. Ternyata Al-Ghazali walaupun beliau banyak menyampaikan manfaat uzlah dalam kehidupan para hamba berdasarkan banyak ayat dan hadits Nabi saw, tapi beliau tetap berpendapat dengan manhaj moderat dan pertengahan serta

seimbang antara memutuskan uzlah dan berdakwah serta menuntut ilmu. Al-Ghazali berkata: “*Amar ma'ruf Nahi munkar*” adalah salah satu dasar agama, hukumnya adalah wajib. Karenanya barang siapa yang berinteraksi dengan manusia pasti dia akan menyaksikan kemungkaran dan bila dia diam atas kemungkaran itu, maka dia berdosa dan durhaka pada Allah swt.

Dalam masalah belajar dan mengajar Al-Ghazali melihat bahwa seorang muslim harus dan wajib belajar dan mengajar bahwa keduanya adalah salah satu ibadah yang paling besar di dunia dan keduanya tidak bisa dilakukan kecuali berinteraksi dengan manusia. Barang siapa yang dirinya belum berilmu dan butuh belajar dan ilmu, maka baginya haram ber'uzlah, sebaliknya bila dia telah berilmu dan mengetahui hal-hal wajib dalam agama, serta melihat bahwa dia membutuhkan fokus dalam ibadah, maka dia boleh beruzlah”

Salah satu faktor pendukung penyebaran Islam moderat atau moderasi yang makna lain dari *tawwassuth*, atau *wasathiyah* di Indonesia adalah melalui jalur pesantren. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat strategis dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, yang diharapkan dari Islam moderat ini lebih memprioritaskan ajaran agama Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Kiprah dunia pesantren ditengah-tengah masyarakat sudah mampu mengkomodasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan ajaran Islam. Karakter moderat tersebut tidak bisa dipisahkan dengan sistem pendidikan Islam, termasuk pesantren banyak menunjukkan sifat terbuka dan tidak menutup diri dalam hal pendidikan yang di implementasikan dalam pengajian kitab-kitab *at-turats* atau klasik.

Dalam dunia santri sumber rujukan yang paling utama dalam memahami makna dan arti moderasi adalah bersumber dari

al-Quran dan Hadis disamping *kutub at turats* atau kitab klasik yang sudah tidak menjadi asing dikalangan santri Indonesia.(*)

DAFTAR RUJUKAN

- Afiuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologis)*, Cet. Ke2, (Jawa Timur: Tanwirul Afkar).
- Abdul Harim, *Peran Strategi Pesantren dalam Membangun Spiritual* (Jakarta: Media Pustaka, 2001).
- Amin, A. T. M.. Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam, *Jurnal Al Qalam*, 20 (3). (2014)
- Asrori, S. Lanskap Moderasi Keagamaan Santri: Refleksi Pola Pendidikan Pesantren. *JISI: Jurnal Ilmu Sosial*. 1 (1). (2020).
- Balitbang. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balai Litbang Kemenag RI 2019.
- Mustafa Rahman, *Humanisasi Pendidikan Islam* (Semarang: Walisongo, 2011).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994),
- Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al- Qurthubi)*, vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman, tt).
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, vol 2, (Kairo: Al-Maktabah A-taufiqiyah, 2003)

Moderasi Beragama Antitesis Liberalisme-Radikalisme

Oleh : Khalil Mubarrak

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: khalil21051998@gmail.com

Indonesia sebagai negara kesatuan yang beranekaragam penganut agama atau kepercayaan sekaligus dilatarbelakangi oleh masyarakat majemuk, keadaan ini sebagai modal kerukunan sekaligus tantangan bagi Indonesia. Tantangan tersebut adalah gesekan sosial yang menimbulkan percikan api pertikaian yang dapat menyulut amarah ketidaknyamanan dalam berinteraksi dan menjalani aktivitas sehari-hari dalam bermasyarakat.

Seperti perselisihan yang tak terbendung dan terus membesar saat pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden yang kerap dipertontonkan. Umat beragama sudah tidak memperdulikan nilai-nilai agama yang disampaikan dalam anutannya. Padahal agama hadir untuk memanusiaikan manusia, agar manusia menjadi makhluk yang baik dan bermoral mulia. Namun karena sedikitnya mereka memahami nilai-nilai agama sehingga mudahnya terjadi pertikain antara sesama.

Masyarakat beragama yang memahami nilai-nilai agama dituntut untuk menghidupkan obor beragama dalam kesehariannya untuk menerangi jalan hidup. Umat beragama menjadikan agamanya sebagai lampu penerang dalam bermasyarakat, ada kalanya mereka berinteraksi dengan seagama dan mungkin mereka juga berinteraksi dengan agama yang berbeda pada saat yang lain. Namun sebagian dari umat beragama terlalu berlebihan dalam menerapkan nilai-nilai agama sehingga tidak ideal dipandang mata, terkadang sampai keluar dari nilai esensi utama dalam agamanya sendiri.

Kejadian ini membuat mereka bersifat anarki dalam bertindak dan berperilaku terhadap yang tidak sependapat dengannya, hal ini bisa langsung dirasakan seperti cacian kepada mereka yang tidak berpakaian gamis, tidak berjenggot, tak bercingkrang, dan tak bersorban, mereka dianggap sebagai manusia yang tidak kaffah dalam beragama. Dibalik itu ada juga kelompok orang yang ingin mengubah ideologi negara, yang sudah menjadi kesepakatan bangsa kita.

Hal ini terjadi karena pemikiran yang radikal dalam beragama sehingga berujung menjadi teroris dan melakukan pemberontakan sampai menghalalkan membunuh sesama dengan mengatasnamakan jihad dari agama tertentu.

Kementerian Agama menyikapi persoalan ini, dengan menawarkan sebuah solusi yang menangkis pemahaman sekelompok orang yang minim memahami nilai beragama dengan mengatakan semua agama adalah sama (liberal) dan ada juga yang mengangnggap pemahamannya saja yang benar dan yang lain salah (extrem atau radikal). Solusi yang ditawarkan adalah jalan tengah dalam beragama yang disebut dengan “Moderasi Beragama”.

Menempuh Jalan Tengah

Moderasi beragama adalah sebuah tindakan yang membentuk sikap ideal dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Jika ditinjau dari segi bahasa kata moderat yaitu turunan dari kata moderation yang bermakna tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa latin moderatio, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan) alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi di sandingkan dengan kata beragama, maka kata tersebut merujuk kepada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pan-

dang, sikap dan praktik dalam beragama.

Jika dilihat dalam bahasa Arab, padanan moderasi ialah wasata atau wasathiyah yang bermakna i'tidal (adil) atau tawazun (seimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut dengan wasit. Kata wasit kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, yang secara garis besar memiliki tiga makna, pertama artinya penengah atau perantara seperti proses terjadinya sebuah transaksi dalam sebuah bisnis perdagangan, ada perantaranya untuk mencapai sebuah tujuan. Kedua, peleraai atau pemisah, seperti orang yang mendamaikan pertikain antar dua kubu. Ketiga, pemimpin atau penentu seperti pemimpin sebuah pertandingan sepak bola yaitu wasit, sebagai pemimpin pertandingan agar berjalannya sebuah pertandingan dengan lancar, aman dan terkontrol.

Dalam ber-moderasi beragama perlu diketahui bahwa, tidak extreme dalam memandang nilai-nilai agama adalah sebuah kata kunci untuk be-moderasi beragama. Sudah menjadi kewajiban masyarakat yang bermoderasi beragama memiliki sifat yang objektif yang didasari ilmu pengetahuan dalam menyikapi masalah, baik masalah agama atau non agama. Moderasi beragama diliputi oleh nilai esensi ajaran agama seperti melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berprinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara.

Ada tiga hal yang dianggap melebihi batas beragama; pertama atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harakat mulia kemanusiaan, kedua atas nama agama melanggar kesepakatan bersama untuk kemaslahatan, ketiga atas nama agama seseorang dengan sengaja melanggar hukum. Jadi setiap masyarakat bermoderasi beragama wajib menghindari tindakan tersebut di atas, agar menjadi masyarakat yang membawa kenyamanan dan ketenangan dalam berbangsa.

Prof. Quraish Shihab menyebutkan kunci seseorang washatiyah atau ber moderasi beragama ialah mempunyai pengetahuan, jangan emosi (karena emosi beragama yang berlebihan dapat membuat seseorang melanggar agama yang diyakininya), dan berhati-hati (dalam melakukan ibadah agar tidak rugi dan mendapat untung).

Moderasi beragama juga sebagai pemicu masyarakat bersikap ramah dan baik, sikap ini dilandasi dari tindakan mereka yang berlaku adil dalam sebuah masalah. Dari perilaku yg baik dalam bentuk moderasi beragama akan menumbuhkan rasa percaya atas sesama agama dan agama yang berbeda. Sifat percaya kepada orang lain akan berpengaruh dalam aktivitasnya, yang mana dari ini akan memunculkan nilai persaudaran yang tinggi dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Persaudaraan yang terjalin dengan baik akan berdampak ke dalam aspek nasionalis yaitu cinta tanah air dan menjadi sebuah kebanggaan sebagai warga negara kesatuan republik indonesia, hal ini terpicu dari kuatnya ukhuwah yang menumbuhkan cinta, baik cinta dengan sesama beragama ataupun cinta nasionalis.

Moral dan akhlak akan muncul dalam ber moderasi beragama yang terbentuk dari ikatan ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan sesama manusia, yang akan menimbulkan rasa hormat dan rasa menghargai terhadap penganut agama tertentu yang berbeda dengan nya dalam bentuk toleransi dalam beragama, dan juga oleh masyarakat bermoderasi beragama akan terbentuk rasa menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dalam beragama. Jalinan persaudaran yang seagama dan sesama manusia akan terus terjaga selama dalam ruang lingkup moderasi beragama, karena di sini akan hadir toleransi-toleransi beragama yang membuat jalinan ukhuwah sebangsa akan terjaga dan harmoni, hidup damai dan bahagia. (*)

**Artikel ini telah diterbitkan di kolom koranindependen.co
<https://koranindependen.co/opini/r-10481/moderasi-beragama-antitesis-liberalisme-radikalisme>*

Antara Papua dan Aceh dalam Bingkai Moderasi Beragama

Oleh: Nellis Rana Roza

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: nellis2021rr@gmail.com

Moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, guna membangun sikap toleransi dan memperkuat kesatuan dan persatuan.

Sebagai bangsa besar, Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras maupun agama, yang diikat dalam satu kebhinekaan. Di Aceh saja, masyarakatnya sangat heterogen, mulai dari etnis, dan keyakinan. Ruang keberagaman itu juga ada di beberapa kampus yang menghimpun mahasiswa dari latar yang berbeda, seperti di Universitas Teuku Umar (UTU), di Kabupaten Aceh Barat.

Tahun 2021, sebagai kampus umum non keagamaan, UTU resmi kedatangan pelajar dari Papua, mereka yang lulus dari seleksi beasiswa pemerintah. Sebagai seorang mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, saya terdorong untuk melihat keberadaan mereka dalam bingkai moderasi beragama, yang menjadi wacana besar Kementerian Agama.

Saya memutuskan untuk menjumpai dan bertanya langsung kepadanya bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dengan mereka. Saya menemui Martha Woraip, seorang mahasiswa dari Niyimbang, Papua, Boven Digoë. Usianya 19 tahun, dia mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UTU, yang menganut agama Katolik. Ini sangat menarik sekali, mungkin kita tidak asing lagi jika di UTU dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Aceh, ada mahasiswa/i non-muslim yang berasal dari berbagai daerah. Tetapi menariknya, baru tahun ini di UTU ada

mahasiswa/i yang berasal dari Papua, bahkan juga ada yang dari NTT.

Martha Woraip dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya bekerja sebagai petani di kampung halamannya. Walau begitu, semangat dan tekatnya sangat lah kuat untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi di universitas, meski harus jauh dari orang tua dan keluarga.

Saat pertama kali dia bergabung di UTU kedatangannya di sambut dengan hangat oleh mahasiswa/i lainnya, bahkan dia merasa sangat senang. Walaupun dia tidak terbiasa dengan lingkungan barunya, akan tetapi dia bisa beradaptasi dengan baik antara sesama teman yang lain. Dia sangat kagum dengan orang Aceh, katanya di Aceh sangatlah bagus semua orang berpenampilan sopan dan rapi, berbeda dengan daerahnya yang mana masyarakatnya bebas berpenampilan tanpa ada aturan yang mengatur tentang berbusana. Ya, kita bisa pahami bahwa di sana berbeda dengan Aceh, yang memiliki aturan tertentu seperti Qanun yang diterapkan demi terlaksananya agama Islam.

Awalnya dia merasa canggung dengan aturan-aturan yang ada, tetapi setelah beberapa waktu, dia mulai mengikuti dan mempelajari aturan-aturan yang ada di Aceh, baik cara berpenampilan, berbahasa, dan menghargai sesama umat lainnya. Kita sebagai umat Islam juga harus menghargai dan menghormati sesama agama lain, tidak boleh mencaci maupun membenci bahkan menzalimi dengan sesama umat, ini juga termasuk salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM) yang harus di junjung tinggi oleh semua orang. Ini sangat jelaskan bukan, dalam islam saja juga ada anjuran dan peringatan untuk kita menghargai dan menghormati dengan sesama umat lain terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinannya masing-masing.

Modal Kesatuan dan Persatuan

Islam adalah agama yang “*rahmatat bin ‘alamin*” artinya, Islam selalu memberikan toleransi dalam bentuk menghormati dan menghargai bukan dengan memaksa. Di sini sangat jelas bahwa kita sebagai umat islam tidak boleh memaksa siapa pun untuk masuk ke dalam agama Islam, maupun agama lain. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita agar kita saling menghargai setiap keputusan dan keyakinan sesama pemeluk agama, tanpa harus memaksa dan mengancam umat yang lain.

Mengenai Papua, di sana masyarakatnya juga ada yang menganut agama Islam. Bahkan mereka saling berinteraksi satu sama lain dengan baik, walaupun disana mayoritasnya banyak yang non-muslim, seperti katolik dan lain sebagainya. Namun kehidupan masyarakat di sana dibangun atas dasar saling menghargai dan menghormati sesama, agama dianut sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Di sana juga tidak ada masyarakat yang mencaci, membenci maupun menzalimi antar pemeluk agama, mereka tetap mengayomi dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik, tanpa harus melihat dari segi keyakinan agamanya. Mereka memiliki kesadaran dan toleransi untuk menghargai setiap perbedaan-perbedaan.

Inilah Indonesia yang memiliki simbol “Bhinneka Tunggal Ika” (meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu). Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna yang sangat luas, yaitu meskipun masyarakat Indonesia berbeda-beda baik suku, ras, budaya, bahasa, agama dan kepercayaan tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan.

Negara republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan memiliki beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Jadi peran kita sebagai masyarakat Indonesia adalah kita harus menghargai setiap kepercayaan maupun adat dan istiadat setiap

agama, baik itu muslim maupun non-muslim demi terciptanya bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, guna membangun sikap toleransi dan memperkuat kesatuan dan persatuan.

Dalam moderasi beragama kita dituntut untuk adil dan bijaksana, bukan merusak dan melakukan kekacauan di bumi ini, sehingga menjadi umat yang terpecah belah. Sikap ini juga harus disadari pada diri kita sendiri agar kita mampu bersama-sama menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan tentram.

Sudah seharusnya pembelajaran moderasi beragama ada di semua perguruan tinggi di Indonesia, guna memberikan pengajaran terhadap setiap generasi-generasi muda, sehingga mengetahui akan pentingnya sikap toleransi sesama pemeluk agama, maupun antar umat beragama. Dengan demikian, ke depan akan melahirkan generasi-generasi muda Indonesia yang moderat untuk mewujudkan Indonesia yang rukun dan damai.*

**Artikel ini telah diterbitkan di kolom basajan.net*

<https://basajan.net/antara-papua-dan-aceh-dalam-bingkai-moderasi-beragama/>

Toleransi dalam Bingkai Multikultural

Oleh: Sofianis

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: sofyanmbo443@gmail.com

Jauh sebelum moderasi beragama digaungkan sekitar lima tahun terakhir, Aceh Barat sebagai salah satu kabupaten di provinsi Aceh telah belajar hidup dalam bingkai multikulturalisme bahasa, suku, etnis, dan agama.

Bahkan sebelum dimekarkan menjadi beberapa kabupaten, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 Km² atau 1.010.466 Ha sekaligus menjadi pemilik garis pantai terpanjang di Aceh sejauh 250 Km² yang membentang mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan dengan Aceh Selatan).

Gambaran landscape ini menegaskan kekayaan multikultural yang menjadi modal bagi Aceh Barat saat ini. Kabupaten Aceh Barat kini menjadi ikon yang kian memukau mata masyarakat lokal maupun mancanegara. Api sejarah masa lalu yang dinyalakan putra terbaiknya Teuku Umar dan kawan-kawan menjadi titik awal yang selalu dikenang tak pernah redup.

Obor itu kian menerangi jagad setelah perguruan tinggi umum dan agama memancang gedung-gedungnya di kota ini, dalam dua dekade terakhir perguruan tinggi itu telah melahirkan para sarjana yang mengisi kemerdekaan Indonesia saat ini.

Kehadiran berbagai perguruan tinggi itu menguatkan toleransi dalam bingkai multikultural yang telah lama dirawat karena menampung pelajar dari berbagai penjuru nusantara sekaligus keragaman yang melampaui batas-batas ke-Acehan yang kental dengan keislamannya. Aceh Barat didatangi pelajar hingga dari

Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, dapat dikatakan bhineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu Indonesia tercipta di Aceh Barat.

Moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas pemerintah saat ini dapat dimaknai sebagai pilar kebhinekaan yang kokoh untuk membangun suasana yang harmoni di tengah masyarakat Indonesia tak terkecuali di Aceh Barat. Moderasi beragama patut disambut dengan kebahagiaan karena dapat dijadikan sebagai cara pandang baru di tengah sibuknya sebagian orang saling menyalahkan, saling mengkafirkan, dan saling menyesatkan yang menghabiskan energi lahir-batin dan nyaris tidak merawat toleransi.

Merawat Toleransi

Laboratorium Program Studi Sosiologi Agama LABPSA Tv UIN Ar-Raniry sebagai salah satu chanel youtube yang mengajarkan saya arti penting toleransi lewat gawai yang saya punya, LABPSA Tv menyajikan konten-konten yang sangat mencerdaskan.

Sebuah konten yang sempat saya simak ketika Prof. Yusni Saby membincang nasib umat Islam di tangan Joe Baiden Presiden Amerika terpilih baru-baru ini bersama Reza Idria, P.hD yang menjadi modarator dalam acara itu, keduanya sama-sama mempunyai pengalaman tinggal di Amerika dalam rangka menyelesaikan pendidikan.

Kata yang persis saya ingat di awal perbincangan itu “Amerika jauh tapi dekat”. Kata itu bermakna belajar pada Amerika meskipun daerahnya jauh tapi beberapa hal dapat diterapkan dekat disekitar kita, seperti toleransi. Mereka telah berhasil merawat toleransi dalam keragaman yang sulit dibangun sebelumnya seperti antara bangsa Afro-american yang bercirikan kulit hitam dengan waith anglo-sexon protestanism sebagai ras yang dianggap lebih mulia (hight superiority) di masa yang lalu.

Toleransi atau tasamuh dalam pengertian sederhana berarti dengan sadar membiarkan sesuatu, namun secara luas pengertian toleransi merupakan suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, saling menghormati atau menghargai antar-kelompok maupun antar-individu (perseorangan).

Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu tatanan masyarakat, toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak atau lebih.

Toleransi mencakup banyak bidang diantaranya toleransi beragama yang paling penting dibangun di Indonesia, karena sila pertama Pancasila “ketuhanan yang Maha Esa” menjadi dasar bagi semua masyarakat Indonesia untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama dan kepercayaan sangat dibutuhkan agar tidak memunculkan gesekan yang dapat mencekamari multikultural Indonesia.

Makna toleransi termuat pula dalam UUD 1945 yang mengatur tentang tatanan hidup bermasyarakat yang beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Sehingga kita sebagai warga Negara sudah sewajarnya dan sepatutnya untuk saling menghormati serta menghargai demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi termasuk di dalamnya antar umat beragama dan kepercayaan. Sebagai masyarakat maupun individu, kita harus menyadari kebhinnekaan seperti bahasa, suku, ras, etnis, dan agama yang dianugerahkan Tuhan di dalam negara kita.

Konsep toleransi ini harus selalu kita tanamkan, pupuk dan rawat agar tumbuh dengan baik yang dapat menaungi setiap orang maupun sebagai bangsa. Keberagaman itu merupakan sunnatullah yang tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan, tugas kita hanyalah merawatnya.

Dengan toleransi diharapkan dapat merawat perbedaan dan menciptakan kedamaian. Dalam agama Islam sebetulnya konsep-konsep seperti ini juga sudah dikenal seperti Islam rahmatan lil alamin, Islam wasathiyah, Islam tengahan, Islam moderat yang kemudian dalam perkembangan mutakhir menjadi moderasi beragama. Maka semakin jelas keterikatan atau kesinambungan antara hukum Tuhan dan hukum manusia yang sama-sama menjunjung tinggi rasa toleransi di tengah multikultural. (*)

*Artikel ini telah diterbitkan di kolom koranindependen.co
<https://koranindependen.co/nasional/r-10480/toleransi-dalam-bingkai-multikultural>

Kehidupan Etnis Cina di Abdya

*Oleh: Nelva Sofia
Mahasiswa STAIN Meulaboh
Email: nelvayusuf20@gmail.com*

Sikap saling menghargai, menghormati dan tolong menolong yang ditunjukkan warga Cina tidak hanya dalam aktivitas sehari-hari saja, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan.

Bila anda berkunjung ke Kota Blangpidie, maka anda akan dengan mudah menemukan dan merasakan nuansa toleransi di sana. Blangpidie merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada di kawasan Barat Selatan Aceh.

Di negeri “Breuh Sigupai” ini, penduduknya sangat beragam. Selain berasal dari berbagai daerah di Aceh dan Indonesia, di sana juga ada warga etnis Tionghoa Cina yang hidup rukun bersama penduduk setempat. Layaknya kehidupan warga Cina lainnya di Indonesia, di Blangpidie pun kebanyakan dari mereka hidup dengan membuka berbagai jenis usaha. Mulai dari toko emas, perlengkapan elektronik dan lain sebagainya.

Hadirnya usaha-usaha warga Cina ini, tidak lantas membuat masyarakat setempat merasa tersaingi. Bahkan usaha-usaha yang dijalankan Cina, telah memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakat Aceh Barat Daya (Abdya), terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan perkerjaan.

Warga Cina yang mempekerjakan para muda-mudi di daerah ini, sangat memahami dan mengerti banyaknya perbedaan di antara mereka, termasuk berbeda secara agama. Bahkan para warga Cina yang mempekerjakan warga setempat yang notabene beragama Islam, mereka menganjurkan para karyawannya untuk makan di warung dan juga memberi waktu kepada karyawannya untuk beribadah.

Tidak hanya itu, komunitas Cina juga merupakan bagian

yang sangat penting di Abdy, selain dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, mereka juga merupakan investor-investor bagi perusahaan-perusahaan di Abdy.

Toleransi adalah Kunci

Berbicara mengenai warga Cina, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kita, seperti di mana anak-anak mereka bersekolah. Biasanya, anak-anak Cina ini akan bersekolah di sekolah-sekolah umum, di bawah naungan Kemendikbud. Hanya saja, tidak semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut mereka ikuti. Misalkan mata pelajaran Agama Islam, pihak sekolah tidak mewajibkan mereka untuk mengikutinya.

Dari dua kondisi di atas, terlihat jelas bahwa sikap toleransi pada masyarakat Abdy dan warga Cina di sana sangatlah tinggi. Toleransi merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, memahami satu sama lain serta sikap saling tolong menolong antar sesama untuk menciptakan suasana damai, rukun dan sejahtera.

Hubungan sosial antara warga Cina dengan masyarakat Abdy sangatlah enak dipandang mata. Sikap saling menghargai, menghormati dan tolong menolong yang ditunjukkan warga Cina tidak hanya dalam aktivitas sehari-hari saja, tetapi juga dalam kegiatan keagamaan. Mereka juga sering ikut berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan oleh masyarakat setempat, seperti Maulid Nabi SAW, di mana mereka ikut menyumbang uang untuk keperluan acara tersebut.

Penduduk Abdy juga sangat ramah dengan warga asing yang datang ke daerah ini, mereka juga saling memahami dan mengerti satu sama lain. Warga Cina yang ada di daerah ini saling bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk saling bergotong royong dan saling menjaga antar satu dengan yang lain.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan mungkin bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Meski pun ada

perbedaan di antara masyarakat, namun kita harus bisa saling mengerti dan menghargai setiap perbedaan yang ada, baik di kelompok masyarakat maupun secara individu.

Maka dari itu, sikap toleransi haruslah ada dalam diri kita. Dengan adanya sikap toleransi, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang diskriminasi terhadap satu kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kuat dalam Perbedaan

Sikap toleransi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang lumrah kita temukan perbedaan pandangan, agama, ras, suku dan budaya. Perbedaan tersebut, seharusnya ini menjadi sebuah alasan untuk saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk dipertentangkan. Apalagi dalam sebuah daerah dengan penduduk yang beragam, sikap toleransi dapat menciptakan sebuah kehidupan yang damai, rukun dan sejahtera dan dapat menghindari keributan serta perbuatan-perbuatan kriminal.

Sikap toleransi diperlukan bukan hanya untuk kelompok minoritas saja, tetapi setiap manusia. Sebab setiap kita pada hakikatnya membutuhkan kehidupan yang harmoni. Seperti kata pepatah “belajar toleransi adalah belajar tentang landasan untuk menciptakan dunia yang baik”. Sikap inilah yang ditunjukkan warga Abdya terhadap warga pendatang, terutama etnis Cina.

Kehidupan kedua kelompok masyarakat tersebut sangatlah harmoni, damai, rukun dan sejahtera serta indah untuk di pandang. Ini disebabkan karena adanya sikap toleransi yang ada dalam diri mereka. Perbedaan yang ada dijadikan sebagai kekuatan dalam kebersamaan, serta saling melengkapi satu sama lain.(*)

**Artikel ini pernah diterbitkan di kolom basajan.net
<https://basajan.net/kehidupan-etnis-cina-di-abdya/>*

Membangun Dialog Umat Beragama

Oleh: Arisma Dewi

Mahasiswa STAIN Meulaoh

Email: arimadewyayiee@gmail.com

Musyawaharah atau dialog sangat diperlukan umat beragama –baik internal maupun eksternal– dalam menciptakan keharmonisan dan perdamaian di tengah perbedaan umat yang semakin kompleks saat ini seperti. Ini menjadi keniscayaan di tengah semakin menguatnya persinggungan akibat perbedaan agama, mazhab, dan pemahaman. Bahkan perbedaan yang diakibatkan oleh organisasi.

Perbedaan-perbedaan tersebut tidak mungkin dapat disatukan karena mempunyai argumentasi masing-masing dengan merujuk pada dalil-dalil yang diyakini kebenarannya (*trust claim*).

Trust claim merupakan suatu yang positif karena dengan itu umat beragama dapat beragama dengan sungguh-sungguh, akan tetapi juga mempunyai potensi menimbulkan gesekan hingga konflik, meskipun konflik itu juga dapat disebabkan oleh kepentingan politik, ekonomi, status sosial dan lain sebagainya.

Sebagai umat beragama harus dipastikan tidak menjadikan agama sebagai penyebab konflik, karena hakikat agama adalah menuju kedamaian dan keselamatan. Adalah suatu keanehan ketika agama dijadikan sebagai motif menyerang, menyakiti, memaki, menghianati, hingga membunuh. Wajah agama diubah dan ditampilkan dari kedamaian dan keselamatan menjadi menakutan dan mengancam. Itulah sebabnya sebahagian orang enggan beragama (*atheis*), mereka terlanjur menyimpulkan agama sebagai akar permasalahan.

Kompleksitas perbedaan yang tidak menghadirkan

musyawarah atau dialog akan menimbulkan kesalahpahaman bahkan tidak sedikit telah dinilai sebagai penistaan terhadap agama dan kepercayaan tertentu. Hal tersebut menjadi bukti pada publik betapa pentingnya musyawarah atau dialog dilakukan dengan baik.

Beberapa faktor yang sangat nyata menjadi penyebab munculnya konflik antar atau intern umat beragama karena tidak adanya pemahaman yang cukup dan tidak adanya sikap saling menghargai.

Sikap yang tidak seharusnya dilakukan itu semakin mendapat tempat ketika media sosial berkembang pesat, karena setiap orang dapat saja melakukan penistaan terhadap agama/ mazhab/ organisasi religi tertentu dengan *massive* dengan menggunakan media sosial.

Penyebaran hoaks, kabar disinformasi yang begitu kencang, menyebabkan ruang perbedaan semakin menganga.

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan informasi dapat berpindah ke seluruh tempat dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia dapat kembali diteruskan berkali-kali, dan sangat rentan jika tanpa menghadirkan filter atas kebenarannya.

Era informasi dan teknologi ini membutuhkan kesadaran literasi digital yang baik, sebagai umat beragama tentu pemahaman terhadap agama menjadi salah dasar yang harus dikuatkan untuk menjadi filter.

Menuju Keharmonisan Umat Beragama

Indonesia yang kaya dengan kebudayaan dan kearifan lokal adalah karunia yang harus disyukuri, karena ia bagai mata air gunung yang tidak pernah henti mengalir menjadi oase bagi seluruh masyarakat.

Kearifan lokal Indonesia itu dapat dijadikan sebagai media menuju keharmonisan dalam perbedaan yang semakin kompleks

seperti yang disebutkan di atas.

Tidak sulit untuk melihat perumpamaan, sebut saja di Aceh sebagai salah satu wilayah Indonesia yang dikenal kaya dengan kearifan lokal seni, bahkan beberapa di antaranya telah diapresiasi sebagai seni yang mendunia dan telah diadopsi banyak negara dan tempat seperti tari saman.

Kesenian ini menjadi media pemersatu, yang dapat menciptakan keharmonisan umat beragama karena pelaksanaannya tanpa melihat latar belakang agama dan keyakinan tapi ia sekaligus menjadi media komunikasi atau dialog yang efektif.

Jika dilihat sisi filosofi dari penampilan tari saman itu sangat berarti, karena dalam pelaksanaannya, tari Saman dapat dilakoni hingga ribuan orang dengan gerakan yang lumayan cepat, pun demikian tidak satupun yang berbenturan kepalanya karena mereka saling menyadari batas-batas gerakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Jika demikian halnya dalam beragama, menyadari batas-batas yang tidak boleh dilampaui karena itu dapat menimbulkan gesekan dan benturan dengan agama atau kepercayaan lain, kita yakin tidak akan ada penistaan agama atau kepercayaan sebagaimana disebutkan di atas. Justeru yang tercipta adalah keharmonisan diantara masyarakat.

Kiranya pendekatan kearifan lokal Indonesia itu dapat dijadikan sebagai media dasar membangun dialog di antara umat beragama dan berkeyakinan. Pesan-pesan kearifan lokal yang dapat menciptakan keharmonisan itu harus diawat selamanya, sehingga tidak perlu buru-buru candu dengan budaya luar yang kering dari pesan-pesan keharmonisan dan jauh dari etika-moral keindonesian.

Tantangan budaya luar yang kian nyata merusak generasi saat ini adalah arus deras globalisasi yang diantar lewat media

informasi dan teknologi dalam jaringan yang sulit dibendung oleh siapapun. Satu sisi TI itu adalah kebutuhan saat ini, tapi di lain sisi ia menjadi media yang merusak budaya dan generasi. Misalnya, melalaui TI dapat disusupi iklan-iklan yang sebenarnya tidak pantas bagi semua kalangan seperti anak di bawah umur, tapi anak di bawah umur itu punya akses untuk itu melalui alat TI yang mereka punya, dan cenderung sulit dikontrol apalagi jika secara nyata mereka telah menaruh minat pada gim, Tiktok, dan media lain yang menghabiskan waktu setiap saat secara sia-sia.

Dalam bermain gim dan Tiktok tidak jarang bemunculan bahasa dan busana yang miskin nilai, ketika itu terus menerus disaksikan akan membentuk anggapan biasa yang seharusnya tabu. Sehingga peran orang tua, guru, dosen, tokoh agama dan seluruh elemen terkait sangat diharapkan agar selalu memberi contoh yang baik dan menjadi pengingat untuk generasi di masa yang akan datang.

Sebagai umat beragamapun kita punya andil besar meletakkan dasar ilmu dan iman pada generasi bangsa ini, karena hanya itu yang dapat dijadikan sebagai senjata yang menjaga generasi, agama sebagai *self control* bagi setiap orang sehingga tidak menerobos garis batas perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan.(*)

**Artikel ini pernah diterbitkan di kolom acehtrend.com*

<https://www.acehtrend.com/2021/12/01/membangun-dialog-umat-beragama/>

Tulak Bala: Antara Agama dan Budaya

Oleh: Nurul Zahara

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: nurulzahara24@gmail.com

Prosesi tulak bala di Aceh merupakan salah satu kearifan lokal dalam konteks keyakinan yang dibalut dalam tradisi keacehan. Tak terkecuali di Aceh Barat yang beribukota Meulaboh.

Prosesi tulak bala dilaksanakan pada setiap bulan Safar bertepatan pada Rabu Abéh– istilah orang Aceh untuk mewakili sebutan Rabu paling akhir pada bulan Safar (*buleuen Sapha-red*). Tulak bala dimaknai sebagai upaya meminta perlindungan kepada Allah SWT dari segala mara-bahaya dan juga wabah penyakit seperti Corona yang tengah melanda masyarakat dunia saat ini.

Masyarakat melaksanakannya dengan berbagai macam cara. Masyarakat perdesaan melakukannya dengan berdoa di pinggir sungai yang dipimpin oleh imam masjid setempat. Masyarakat yang tinggal di kota juga melakukan hal yang sama, tapi perbedaannya; mereka pergi ke pantai. Semua orang keluar rumah untuk ikut berdoa. Pada prosesi ini dibarengi dengan makan makanan yang sengaja dibuat untuk acara itu, biasanya dimasak di lokasi acara oleh ibu-ibu yang sudah ditugaskan. Makanan berupa nasi yang dibungkus dengan daun pisang yang khas dengan aroma harumnya.

Selain berdoa dan makan, juga ada acara pelepasan rakit yang dibuat dari pohon pisang, dalam rakit tersebut diisi nasi beserta lauk pauknya yang sudah dikhususkan untuk itu, untuk melaksanakannya sudah ada orang tertentu yang telah ditunjuk sebagai perwakilan lebih kurang terdiri dari tiga orang.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pelepasan rakit

beserta isinya tidak lagi dilakukan oleh masyarakat karena dinilai sia-sia. Mereka menyadari bahwa makanan yang diletakkan di atas rakit tersebut akan terbuang dan mubazir karena tidak ada siapapun yang akan mengambilnya.

Tulak Bala dan Moderasi Beragama

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh merupakan agama samawi yang diturunkan Allah untuk manusia lengkap dengan cara pengamalannya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan juga ada budaya masyarakat yang rutin dilakukan bahkan dianggap sama sakralnya dengan agama, meskipun jika dilihat secara utuh nyaris tidak ditemukan akarnya pada ajaran agama (Islam). Lalu jika demikian halnya apakah harus dipertentangkan, tentu saja tidak.

Penganut agama harus menyadari bahwa agama dan budaya mengalami perkembangan. Bicara perkembangan agama seperti dalam Islam awal misalnya, juga mengakomodir budaya dagang kaum Quraisy yang saling berbagi peran dalam suatu usaha seperti modal dan skill, kemudian hal ini dikenal dengan sebutan mudharabah dan musyarakah dalam sistem ekonomi Islam.

Demikian halnya dengan budaya masyarakat yang berkembang saat ini seperti tulak bala yang disebutkan di atas. Ia diadopsi sebagai budaya dan diperkaya dengan nilai-nilai yang dapat diterima oleh agama. Seperti melepaskan rakit yang diisi dengan makanan yang pernah dilakukan sebelumnya, lalu ditiadakan dalam prosesi tulak bala pada saat ini karena dinilai mengandung mubazir yang dilarang oleh Islam.

Dengan kata lain agama dan budaya dapat hidup berdampingan dan beriringan, tidak harus dipertentangkan. Harus selalu diupayakan adanya sikap kelenturan dalam beragama dan kebudayaan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu terwujudnya

tatanan hidup masyarakat yang aman dan damai dalam bingkai agama dan budaya, menghindari gesekan yang terjadi dalam masyarakat yang dapat mengikis nilai-nilai agama dan juga budaya.

Masing-masing kita adalah aktor untuk menciptakan suasana tersebut. Kalau bukan kita yang melakukan siapa lagi kalau bukan sekarang waktunya kapan lagi, setiap orang menua, dan setelah menua tidak akan kembali ke masa muda.

Jadi jauh-jauh hari persiapan diri kita untuk masa tua nanti lakukan hal-hal positif yang membawa pengaruh besar bagi orang-orang di sekitar kita sehingga bukan diri kita saja yang merasakan manfaat namun juga orang lain. Tentu akan menyesal ketika sesuatu hal yang baik tidak dilakukan padahal membawa pengaruh besar bagi orang-orang lain.

Indonesia yang kaya dengan budaya harus dirawat, jangan terpengaruh dengan budaya luar yang belum tentu dapat merajut persatuan seperti budaya Indonesia termasuk tulak bala yang ada di Aceh. Jadilah bangsa Aceh yang taat beragama sekaligus arif dalam berbudaya.(*)

**Artikel ini pernah diterbitkan di kolom acehtrend.com*

<https://www.acehtrend.com/2021/11/29/tulak-bala-antara-agama-dan-budaya/>

Toleransi Pemburu Babi di Negeri Tauhid Sufi

Oleh : Rusnan Dinata

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: rusnandinata@gmail.com

“Dalam hal ini saya rasa, perlu adanya pendalaman terhadap sejarah agama, tidak cukup dengan ajaran fiqih ibadah saja.”

Di zaman yang semakin maju, lapangan pekerjaan yang semakin sempit, membuat sebagian orang mencari berbagai cara untuk mendapat sumber pendapatan. Seperti yang terjadi di Woyla akhir-akhir ini, sekumpulan orang yang menggantungkan hidup dari berburu babi menelusuri setiap pelosok hutan. Kebanyakan dari mereka adalah warga non-muslim yang datang dari Sumatera Utara dan sekitarnya. Dalam Islam, babi adalah binatang yang diharamkan, sehingga tidak jarang masyarakat memandang sebelah mata terhadap pendatang tersebut.

Woyla merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat, daerah yang ber juluk “Negeri Tauhid Sufi” yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di sana banyak berdiri pesantren/dayah yang menjadi tempat utama dalam mencari ilmu agama. Walaupun demikian, tidak dapat kita pungkiri zaman semakin berkembang dan maju, hidup manusia pun semakin berubah.

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Manusia melakukan berbagai macam cara untuk dapat mencukupi kebutuhannya, salah satunya yaitu merantau ke daerah orang lain. Hal ini bukanlah perkara mudah, saat merantau akan banyak sekali tantangan dan rintangan, karena setiap daerah memiliki keragaman berbeda-beda, mulai dari etnis, budaya, bahasa, dan agama. Kita tidak mudah diterima begitu saja. Na-

mun, jika kita benar-benar mengimani dan mempelajari agama Islam dengan benar, tentunya kita dapat dengan lapang hati menerima setiap perbedaan yang ada, termasuk mereka yang bekerja di luar kebiasaan orang pada umumnya, berburu babi.

Sebenarnya, jika kita melihat lebih jauh, keberadaan para pemburu babi ini membawa banyak dampak positif. Terlebih bagi warga Woyla yang umumnya petani, di mana tanaman mereka sering diganggu hama babi. Walau tidak sepenuhnya hilang, kehadiran para pemburu ini setidaknya dapat mengurangi jumlah babi yang sangat merugikan masyarakat setempat. Para petani tidak perlu lagi memasang perangkap babi di kebun mereka.

Meski demikian, stigma negatif terhadap para pemburu babi masih saja terjadi di dalam masyarakat. Terlebih perburuan dilakukan di tengah mayoritas masyarakat muslim, seperti di Aceh. Namun ada juga masyarakat yang memakluminya sebagai bentuk mata pencaharian orang luar. Jadi, kondisi ini berjalan normal, karena para pendatang yang mencari rezeki dengan berburu babi tersebut tidak mengganggu masyarakat, seakan-akan mereka tau dan sangat menghargai penduduk setempat. Tempat tinggal mereka pun jauh dari pemukiman warga. Mereka hanya turun sesekali saat kebutuhan pokok mereka habis.

Toleransi Kunci Kedamaian

Dalam hal ini saya rasa, perlu adanya pendalaman terhadap sejarah agama, tidak cukup dengan ajaran fiqih ibadah saja. Sikap toleransi telah jauh hari tergambar dalam sejarah Islam, bagaimana Nabi memperjuangkan agama Islam di atas muka bumi ini, dari masyarakat yang semula menyembah berhala, kemudian menyembah tuhan yang satu Allah SWT. Jika Nabi membenci agama lain, pasti Nabi akan terhalang dalam memperjuangkan agama Islam di waktu itu.

Mengenai untuk kesucian harta dan jiwa, kita tidak ha-

rus memojokkan mereka, toh banyak perbuatan-perbuatan kita yang jauh lebih haram. Dalam kehidupan masyarakat kita, masih banyak yang harus dibenahi. Pencuri, perampok uang rakyat dan judi, masih meraja lela, bahkan tidak sedikit juga orang agama Islam yang melakukannya. Maka kita harus banyak introspeksi diri, karena Allah melarang kita untuk saling membenci dan memusuhi terhadap agama lain. Bahkan Nabi kita Muhammad Saw saja, telah mengajarkan kita untuk toleransi dalam umat beragama. Sebenarnya kita bisa membaca sejarah nabi, waktu memperjuangkan agama dan bagaimana sikap Nabi terhadap orang non-muslim. Bahkan ada satu peristiwa, Nabi diludahi oleh orang kafir, namun ketika orang tersebut sakit, Nabi yang pertama kali menjenguknya. Apa pantas kita selaku umat Nabi yang penuh dengan dosa, membenci dan berkata kata kotor terhadap sesama hanya karena berbeda agama?

Pada intinya, kita sama-sama ciptaan Allah sudah sepatutnya saling menghargai antara sesama, baik yang seagama maupun berbeda agama. Di sinilah fungsi *Lakum Dinukum Waliyadin*, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pastinya akan kembali kepada masing-masing diri kita. Jika kita mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai setiap perbedaan yang ada, tentunya orang lain akan manaruh hormat kepada kita. Sebagai umat Islam, hubungan kita tidak semata-mata hanya dengan Allah saja, tetapi juga ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Dalam bernegara, pilihan untuk memeluk agama tertentu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur secara perundang-undangan. Antar umat beragama tidak dibolehkan untuk memaksakan keyakinan agamanya kepada umat yang lain, hal ini untuk menjaga keselarasan antar umat beragama.

Toleransi umat beragama salah satu kunci keamanan dan kedamaian suatu daerah, negara, bahkan dunia sekali pun. Oleh

sebab itu, yang berlalu biarlah berlalu, mulai sekarang mari kita tata dan bangun prinsip baru yaitu toleransi dalam beragama di masyarakat. Menghargai mereka yang berbeda secara agama dan keyakinan dengan kita, seperti itulah Islam menganjurkan. Ketahuilah damai itu indah.(*)

**Artikel ini pernah diterbitkan di kolom basajan.net*

<https://basajan.net/toleransi-pemburu-babi-di-negeri-tauhid-sufi/>

Tari Saman Simbol Perekat Keberagaman di Aceh Barat

Oleh: Rasyada

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: rasyambo611@gmail.com

Walaupun tarian saman penuh dengan syair Islam, namun tidak menghalangi penari dari non-muslim untuk berpartisipasi atau terlibat langsung dalam tarian tersebut. Ini merupakan satu keberkahan luar biasa bagi rakyat Aceh dan Indonesia dalam mewujudkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama.

Setelah menonton chanel Youtube Labpsa TV, yang dirintis oleh Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, saya kian tertarik untuk mempelajari wacana keberagaman dan moderasi beragama. Wacana ini mendorong saya untuk melihat salah satu pertunjukan seni lokal khas Aceh, mengamati secara mendalam, apakah ada unsur keberagaman dalam tarian Aceh? Mengingat dari catatan sejarah, Aceh merupakan kawasan yang sangat menghormati keberagaman.

Seperti kita ketahui, bahwa seni tari merupakan sebuah gerak badan secara berirama yang dilakukan ditempat, serta waktu tertentu, untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, serta pikiran. Tari juga diiringi bunyi-bunyian, berupa musik yang mengatur gerakan penari, serta menguatkan maksud yang mau di sampaikan. Gerakan tari tidak sama dengan gerakan sehari-hari seperti lari, jalan, atau senam.

Gerak di dalam tari tidaklah realistis, tetapi gerak yang sudah diberi bentuk ekspresif serta estetis. Suatu tarian sesungguhnya adalah kombinasi dari beberapa unsur, yakni wiraga (raga), wirama (irama), serta wirasa (rasa). Ketiga unsur tersebut melebur jadi bentuk tarian yang serasi. Unsur paling utama dalam tari yai-

tu gerak. Gerak tari senantiasa melibatkan unsur anggota badan manusia. Dalam Gerakan tari, unsur-unsur anggota badan itu dapat berdiri sendiri, berhimpun maupun bersambungan.

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah di pesisir barat Aceh yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Jarak tempuh ke Banda Aceh, ibu kota provinsi ke Kabupaten Aceh Barat, sekitar 289.39 km atau empat jam menggunakan mobil. Seperti lumrahnya daerah lainnya di Aceh, penduduk Kabupaten Aceh Barat mayoritas beragama Islam. Namun, terdapat juga masyarakat yang beragama Hindu, Kristen, dan Budha, yang hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di Aceh Barat. Meski pun minoritas, namun mereka aktif dalam berbagai hal, baik di bidang sosial maupun budaya, khususnya tarian tradisional khas Aceh seperti tari saman, tari ranup lampuan dan masih banyak lagi.

Keterlibatan warga minoritas dalam tarian tradisional Aceh lumrah ditemui di beberapa sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Dimana seni tari, dijadikan ekstrakurikuler dan kerap dilombakan yang mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh Barat, seperti tari saman.

Saman adalah Berkah

Saman merupakan tarian tradisional khas Aceh yang sarat dengan nilai-nilai islami. Di dalam tarian saman, terdapat syair-syair Islam yang berisi nasehat dalam setiap gerakan maupun liriknya. Tarian ini biasanya di tampilkan saat acara pernikahan, penyambutan tamu kenegaraan, dan event-event besar atau perlombaan, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Walaupun tarian saman penuh dengan syair Islam, namun tidak menghalangi penari dari non-muslim untuk berpartisipasi atau terlibat langsung dalam tarian tersebut. Ini merupakan satu keberkahan luar biasa bagi rakyat Aceh dan Indonesia dalam

mewujudkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama.

Kita sebagai penerus bangsa dan agama, harus memikirkan cara untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia, khusus Aceh Barat jangan sampai pudar. Isu tentang agama merupakan hal sangat krusial, yang dapat memicu keretakan atau pun permusuhan antar umat beragama.

Seni tari merupakan sebuah karya yang bisa diterima setiap lapisan masyarakat, tidak terhalang umur, ras, bangsa dan agama. Karya seni merupakan wadah atau sarana menumpahkan kreativitas dan ide, hingga melahirkan sebuah karya nyata dan diterima tanpa adanya penolakan. Di Aceh Barat, keberadaan seni tari mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bukan hanya sebatas melestarikan budaya, akan tetapi seni tari juga bisa dijadikan media untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara umat beragama di daerah ini. (*)

**Artikel ini pernah diterbitkan di kolom basajan.net*

<https://basajan.net/tari-saman-simbol-perekat-keberagaman-di-aceh-barat/>

Memahami Toleransi Beragama dari Relasi Sosial

Oleh : Satri

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: satriputrapancer@gmail.com

Sebuah siaran youtube, Labpsa TV dari UIN Aceh, kerap menyuarakan moderasi beragama. Diantara pesannya adalah dalam kehidupan sehari-hari seorang individu atau kelompok tidak bisa terlepas dari perbedaan. Setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain diantaranya tidak terlepas dari faktor lingkungan. Dalam konteks kehidupan sosial ini manusia akan diatur oleh peraturan-peraturan, norma-norma, adat, kebudayaan serta ketetapan-ketetapan yang berada di suatu tempat tertentu.

Setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam memahami konsep kehidupan sosial itu sendiri, baik dalam hal kebudayaan, kepercayaan, suku, rasa dan bahasa. Tidak sedikit kita lihat bahwa cara pandang seorang individu dalam menilai individu lainnya itu ada yang mengatakan bahwa jika berbeda kepercayaan, budaya dan suku itu seperti terasingkan atau bahkan tidak terjalinnya hubungan sosial diantara keduanya. Dalam arti kata bahwa sebagian orang menganggap jika tidak selaras dengan dirinya itu adalah orang-orang yang salah, bodoh atau tidak bisa apa-apa.

Pada dasarnya tidaklah demikian, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang ingin dipenuhi berdasarkan dengan tujuan serta keinginan dirinya pribadi. Kepentingan dan keinginan tersebut menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang ingin diwujudkan baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan orang banyak.

Seiring perkembangan zaman yang serba bisa ini, membuat para masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi dan komunikasi antara satu dengan lain. Dengan pesatnya perkembangan teknologi ini sebenarnya bisa menjadi sebagai alat untuk berinteraksi antar sesama dan juga bisa mendekat yang jauh. Penggunaan teknologi ini akan membuat seorang cerdas, memiliki jaringan yang luas, pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Akan tetapi perlu di ingat bahwa teknologi ini membawa dia dampak yaitu, positif dan negatif tergantung bagaimana cara seseorang dalam pemakaian dan menyingkapi akan hal tersebut.

Namun, dibalik itu semua banyak sekali dari kalangan anak-anak, remaja bahkan dewasa sekalipun terkhusus bagi para pengguna teknologi itu salah dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Mereka lebih banyak menggunakan teknologi tersebut demi bermain game daripada menggunakan ke hal-hal dianjurkan dalam agama seperti belajar tajwid, mendengar ceramah atau bahkan banyak sekali di teknologi tersebut yang kita ambil sebagai hikmah pembelajaran dari teknologi tersebut. Karena di zaman yang canggih ini kita tidak perlu lagi baik belajar ataupun mengajar ditempatkan yang ditentukan, akan tetapi dengan adanya teknologi tersebut kita bisa belajar menggunakan handphone atau komputer di rumah masing-masing.

Perlu kita ketahui bahwa dalam upaya membangun interaksi sosial sebagai salah satu bentuk toleransi antar umat beragama tentunya pemerintah harus membentuk sebuah peraturan perundang-undangan mengenai toleransi tersebut. Karena dengan adanya perundang-undangan tersebut akan membuat sebuah jaminan atau perlindungan untuk masyarakat yang berbeda kepercayaan dan lain sebagainya.

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perorangan, kelompok-kelompok manusia ataupun orang-orang dengan

kelompok manusia lainnya. Interaksi sosial ini akan terjadi jika telah melakukan kontak sosial dan komunikasi. Upaya membangun interaksi sosial ini dapat dilakukan dengan cara komunikasi karena dengan komunikasi sangat penting untuk dilakukan dalam membangun hubungan manusia.

Komunikasi merupakan faktor penentu dalam pembentukan interaksi sosial, tanpa komunikasi interaksi sosial tidak akan terbentuk dan dengan komunikasi yang baik dan benar akan membuat seseorang mudah menyampaikan maksud ketika berlangsungnya interaksi.

Dalam hal ini interaksi sosial juga akan memberikan sebuah bentuk dari toleransi sesama umat baik muslim maupun non-muslim. Pada zaman saat ini banyak sekali kita lihat bentuk dan upaya-upaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal beribadah. Dimana toleransi yang ditunjukkan itu adalah sebagai sebuah penghormatan dan penghargaan, contohnya seperti ketika berkumandang azan orang-orang non-muslim menghentikan aktivitasnya sebagai tanda toleransi mereka dan begitu juga sebaliknya ketika orang-orang non-muslim melakukan ritualnya. Begitu pula ketika umat islam melakukan ibadah-ibadah lain, misalnya puasa dimana sikap toleransi juga ditunjukkan oleh umat non-muslim dengan menjaga makan dan minum di depan orang-orang islam.

Toleransi ini dapat kita artikan sebagai sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk saling menghargai atau menghormati perbedaan baik secara kepercayaan atau pendapat orang lain. Dengan adanya sikap toleransi ini, maka akan mencegah terjadinya konflik atau perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena toleransi ini sangat berpengaruh besar terhadap pemersatu bangsa dan mengingat bahwa negara Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam ragam perbedaan salah satunya di bidang ke-

agamaan.

Dalam upaya membangun interaksi dan toleransi antar umat beragama ini bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dilakukan melainkan sebuah proses yang sangat sulit untuk diterapkan khususnya di Aceh karena peraturan semacam itu tidak boleh sewenang-wenang diterapkan di suatu daerah karena hal tersebut ada sangkut paudnya di tangan pemerintah.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 (“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”) oleh karena itu apabila kita membuat sebuah peraturan tentunya berdasarkan ketentuan dari ketetapan dari pemerintah.

(*)

**Artikel ini pernah diterbitkan di kolom atjehwatch.com*

<https://atjehwatch.com/2021/11/18/memahami-toleransi-beragama-dari-relasi-sosial/>

Indonesia dan Moderasi Beragama

Oleh: Irna

Mahasiswa STAIN Meulaboh

Email: irnasafitri@gmail.com

Pasal 1 dalam undang-undang No.1/ PNPS/1965 mengatakan bahwa adanya enam Agama di Negara Indonesia dan motto Negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika yaitu berbeda tapi satu, tapi dibalik semua itu tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun setiap agama mengajarkan bertoleransi dan Negara memiliki pondasi yang memeluk perbedaan juga tetap saja terjadi konflik di Negara ini.

Semua ini bukan hanya semata-merta menyalahkan setiap agama dan juga menyalahkan Negara, tapi kurangnya pemahaman untuk memahami suatu ilmu atau pengetahuan dalam memahami ajaran yang sudah ditetapkan. Memiliki perbedaan pendapat, perdebatan dalam suatu keputusan, dan bahkan terjadinya permusuhan juga bukan hal yang baru, munculnya konflik atau adanya perselisihan yang dari hal kecil bisa menjadi besar dan bahkan ada juga yang tidak memperdulikan nilai dari ajaran agama yang dianutnya sendiri.

Sepanjang sejarahnya, agama juga merupakan penyebab banyak kekerasan di Indonesia seperti suara Islam yang disebut radikal dan munculnya kekerasan (aksi teroris). Ini semua fakta yang kita hadapi, karena keragaman paham umat beragama di Indonesia memang amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia.

Sementara, keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama, bisa memunculkan gesekan dan konflik. Pemerintah menyikapi

persoalan ini dan telah berniat untuk megurangi konflik dan memperkenalkan ajaran yang moderat yaitu “moderasi Beragama” dimana dapat meminimalkan konflik antar agama di Indonesia.

Kata “moderasi” memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata “moderasi” berasal dari kata *moderation*, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata *moderator*, yang berarti ketua (*of meeting*), pelerai, penengah (*of dispute*). Kata *moderation* berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “moderasi” berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstreman. Kata ini adalah serapan dari kata “moderat”, yang berarti sikap selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, dan kecenderungan ke arah jalan tengah.

Dari sekian artikel dan tulisan yang penulis baca, maksud dan tujuan adanya moderasi beragama di Indonesia tidak lain adalah untuk meminimalkan kekerasan, yang besikap sedang, tidak berlebih-lebihan, dan menghindari ke ekstreman dalam praktik beragama. Apakah semudah itu Negara yang memiliki budaya yang kental dan memiliki berbagai suku dalam bersosial dan beragama ini menerapkan moderasi beragama?

Moderasi beragama Indonesia mungkin tidaklah sama dengan moderasi bergama yang diterapkan di negara-negara lainnya, khususnya Negara Arab saudi dimana mungkin mereka menerapkan moderasi beragama seperti membangun bioskop, membangun bar dan menuju islam yang moderat seperti dalam bidang pengarusutamaan gender, perempuan memiliki hak yang hampir setara dengan laki-laki.

Mereka diperbolehkan untuk menyetir sendiri, menghadiri pertandingan olahraga di stadion, bepergian tanpa ijin wali, dan menginap di hotel sendirian. Pada 2019, perempuan juga

diperbolehkan untuk menjadi tentara. Hal ini sudah sangat lazim di Indonesia bisa dikatakan kurang moderat apa Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa Negara lainnya tentang moderasi beragama.

Dalam moderasi beragama di Indonesia yang digaris bawahi adalah upaya meminimalisirkan terjadinya kekerasan atau tindakan yang berlebih-lebihan dalam beragama. Contoh yang sederhana yang dapat kita lihat yaitu terjadinya kerisuhan antara masyarakat yang setuju untuk di vaksin dan masyarakat yang tidak setuju divaksin covid-19, terjadinya pemaksaan dan penolakan dengan argument agama hingga terjadinya demo dan menimbulkan kekerasan. Apakah ada gerakan Anti-vaksin di Indonesia?

Indonesia bukan lokus 'gerakan anti-vak'. Sejak mulainya wacana dan praksis vaksinasi yang dilakukan pemerintah, karena memang tidak ada penolakan berskala besar. Survei Indikator awal Februari 2021 atas 1.200 responden acak dari seluruh Indonesia, menemukan 54,9 persen warga bersedia divaksinasi; 41 persen tidak atau kurang bersedia. Mengapa mayoritas warga Indonesia menerima vaksin?

Dari perspektif agama, tak lain karena mayoritas warga Indonesia penganut dan pengamal moderasi beragama. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama.

Ingat! Yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang teguh pada nilai

moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal.

Dan, harus diingat, moderasi beragama adalah tanggungjawab bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama. Kita perlu bekerjasama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara.(*)

Tentang Editor

Inayatillah, lahir di Banda Aceh, 4 Oktober 1973. Pada usia kanak-kanak, menamatkan pendidikan di MIN Banda Aceh, tahun 1985. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Pabelan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah selama satu tahun dan tamat pada MTs Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1988. Menamatkan MA pada Madrasah Mu'allimaat Mu-hammadiyah Yogyakarta tahun 1991.

Menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di Program Studi Tadris Bahasa Arab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1996. Lulus Magister Studi Islam pada Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1999. Menyelesaikan Program Doktorat Sejarah dan Tamaddun Islam di Universiti Malaya, Kuala Lumpur tahun 2011. Alumni *Affiliate Scholar in The Education Program* yang diselenggarakan oleh East West Center (EWC), pada Oktober 2009 di Hawaii, USA.; *Shortcourse on Community Outreach di McGill University Office of Leadership in Community & International Initiatives*, Montreal, Canada pada 24-28 November 2014; *Shortcourse on Governance and Leadership Training for University Leaders di Institute on Governance*, Ottawa, Canada pada 1-5 Desember 2014; dan *Training on Community Based Research di Centre for Community Based Research*, Kitchener- Waterloo, Canada pada 8-17 Desember 2014.

Aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sejarah Islam, perempuan dan anak. Sejumlah tulisannya telah dimuat di jurnal ilmiah. Menjadi narasumber dalam beberapa seminar dan pelatihan tentang Sejarah Islam, serta isu-isu terkait perempuan dan anak. Pernah tampil sebagai pembicara pada konferensi internasional dan

nasional.

Selain menjadi dosen Mata Kuliah Sejarah Peradaban Islam, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, juga pernah menjabat sebagai Senator Institut IAIN Ar-Raniry 2008-2010, Senator Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry 2010-2014, Kepala PSGA LP2M UIN Ar-Raniry 2013-2018.

Sejak 2019 hingga sekarang, menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

Email : inayatillah@staindirundeng.ac.id

Buku “Moderasi Beragama Dari Pinggir” ini merupakan sebuah karya Seuramoe Moderasi Beragama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang berisikan kumpulan artikel para akademisi, jurnalis dan masyarakat umum. Buku ini berupaya mengupas tentang moderasi beragama dari sudut pandang masyarakat yang berada di “pinggir” Indonesia, terutama Aceh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, tidak semua nilai-nilai moderasi beragama dapat dimaknai oleh pandangan orang secara jamak. Terutama nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di daerah-daerah yang berada di pinggir wilayah Barat Indonesia, seperti Aceh. Sehingga, perlu kiranya digali nilai-nilai moderasi beragama tersebut untuk dijadikan sebagai pegalaman berharga.

